



DINAS PANGAN, TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA



# RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.



## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan



- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2. Sarana dan Prasarana / Aset.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.5. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kedepan .....	38
2.7. Hubungan Internal dan Eksternal.....	39
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.....	41
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	43
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.4. Penentuan Isu –isu Strategis.....	47
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	48



<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>P E N U T U P.....</b>	<b>72</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 60 Tahun 2016 .....	9
Tabel 2.2	Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim .....	11
Tabel 2.3	Tenaga Penyuluh di Kabupaten / Kota .....	17
Tabel 2.4	Tenaga POPT di Kabupaten / Kota.....	17
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim .....	18
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim 2024 – 2026 .....	21
Tabel 2.7	Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019 – 2022 .....	27
Tabel 2.8	Data Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019 – 2022 .....	27
Tabel 2.9	Produksi Tanaman Pangan (Padi) dan Hortikultura Tahun 2019 – 2022.....	29
Tabel 2.10	Data Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2019 – 2022 .....	30
Tabel 2.11	Data Produksi dan Produktivitas Hortikultura Tahun 2019 – 2022.....	31
Tabel 2.12	Data Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi Tahun 2019 – 2022.....	31
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim Tahun 2021 – 2022 .....	33
Tabel 2.14	Luas Baku Sawah Nasional Kaltim Per-Kecamatan Tahun 2019-2020 .....	37
Tabel 2.15	Croscutting Internal Dinas Pangan TPH Kaltim .....	40
Tabel 2.16	Crosscutting External Dinas Pangan TPH Kaltim.....	40
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim .....	43
Tabel 3.2	Program Unggulan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim.....	47
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 .....	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.....	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur .....	68



Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur .....	71
-----------	---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Dinas
- Lampiran 2 Cascading
- Lampiran 3 Pohon Kinerja
- Lampiran 4 Diagram Crosscutting
- Lampiran 5 LBS Nasional ATR Th. 2019



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan digabung menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari arah dan kebijakan strategis RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu pada pembangunan nasional bidang pertanian seperti tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Pertanian (K/L) Tahun 2020 – 2024.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2025 untuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
2. Sasaran 3 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi
3. Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara (%)

Pembangunan di bidang pangan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Agenda utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta penganeekaragaman pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna

menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Rencana Strategis (Renstra) disusun guna menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan menjaga fokus pencapaian sasaran periode 3 (tiga) tahun ke depan serta melakukan review berdasarkan evaluasi setiap tahun, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai acuan kerja penyelenggaraan pembangunan di pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun.
2. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan periode 2024 – 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya.
4. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program / kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah / lapangan.
5. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sehingga memberikan kontribusi bagi perwujudan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.



6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

**BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur**, berisi gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

**BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**, berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L dan Renstra; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi Strategi dan Arah Kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

**BAB VI. Rencana Program,** berisi Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan,** berisi Indikator Kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**BAB VIII. Penutup,** berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

#### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu :

**“ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan “**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

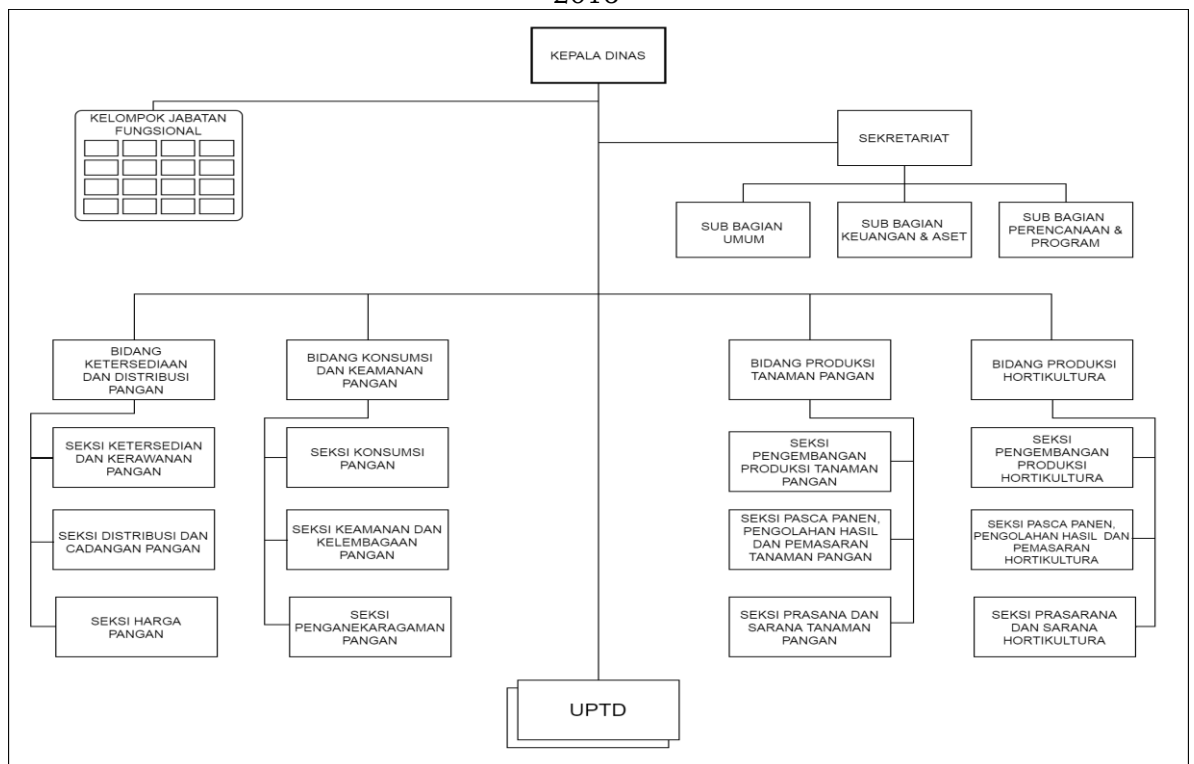
- a. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pengembangan tanaman pangan;
- c. Pengembangan hortikultura;
- d. Penataan prasarana pertanian tanaman pangan;
- e. Penataan prasarana pertanian hortikultura;
- f. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Pemberian ijin usaha atau rekomendasi teknis pertanian;
- i. Pembinaan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- j. Pembinaan distribusi dan cadangan pangan;
- k. Pembinaan harga pangan;
- l. Pembinaan konsumsi pangan;
- m. Pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan;
- n. Pembinaan penganekaragaman pangan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- q. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur.

**Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut

**Tabel 2.1**

Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
  - c. Seksi Harga Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
  - a. Seksi Konsumsi Pangan



- b. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan
  - c. Seksi Penganekaragaman Pangan
5. Bidang Produksi Tanaman Pangan :
- a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
  - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan
6. Bidang Produksi Hortikultura :
- a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura
  - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
- a. UPTD – Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
  - b. UPTD – Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura
  - c. UPTD – Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura
  - d. UPTD – Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Kelompok Jabatan Fungsional :
- a. Tenaga Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
  - b. Tenaga Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
  - c. Tenaga Fungsional Penyuluh
  - d. Tenaga Fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

**Tabel 2.2**

Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Prov. Kaltim

<b>Jabatan</b>	<b>Ringkasan Uraian Tugas</b>
Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>c. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DinasPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</li><li>d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang tanaman pangan dan hortikultura dan kelompok jabatan fungsional serta unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;</li><li>e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Dinas;</li><li>f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li><li>g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;</li><li>h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;dan</li><li>i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</li></ul>
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, ketersediaan dan konsumsi pangan serta prasarana dan sarana;</li><li>b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;</li><li>c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan;</li><li>d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan</li><li>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.</li></ul>
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;</li><li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;</li><li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;</li><li>d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;</li><li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;</li><li>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ul>
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;</li><li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;</li><li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;</li><li>d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;</li><li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan</li></ul>

	<p>serta penganekaragaman pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan	<p>a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan;</p> <p>b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan teknis dan pelaporan statistic tanaman pangan;</p> <p>c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan;</p> <p>d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan tanaman pangan;</p> <p>e. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang tanaman pangan;</p> <p>f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana tanaman pangan;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</p>
Kepala Bidang Produksi Hortikultura	<p>a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura;</p> <p>b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan teknis dan pelaporan statistik hortikultura;</p> <p>c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura;</p> <p>d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan hortikultura;</p> <p>e. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang hortikultura;</p>



	<p>f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana hortikultura; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</p>
Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>a. Penyusunan rencana teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura; c. Pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; d. Pelaksanaan pengujian proteksi tanaman pangan dan hortikultura; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; f. Pengelolaan urusan ketatausahaan; g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>a. Penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan; e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	<p>a. Penyusunan rencana teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya</p>

	<p>manusia pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;</li><li>d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;</li><li>e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li></ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;</li><li>e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li></ul> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terlepas dari dukungan sumberdata manusia pertanian, sumberdaya alam termasuk air, lahan, komoditas beserta sarana dan prasarana.

Sumberdaya aparatur (petugas) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Adapun jumlah PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 218 orang yang terdiri dari a) Pejabat Struktural sebanyak 18 orang yang meliputi 1 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV serta 10 Fungsional yang disetarakan. Komposisi PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a. Pejabat Struktural dan Non Struktural :

- I. Esselon II : 1 orang
- II. Esselon III : 11 orang
- III. Esselon IV : 12 orang
- IV. Fungsional Yang Disetarakan : 10 orang
- V. Non Struktural : 128 orang

b. Pejabat Fungsional :

- I. Penyuluh Pertanian : 3 orang
- II. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT – PHP) : 39 orang
- III. Pengawas Benih Tanaman : 16 orang
- IV. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) : 4 orang
- V. Stansi Ahli Pertama : 1 orang
- VI. Widyaiswara : 3 orang

Selain tenaga PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Sumber Daya Manusia Pertanian juga berada di Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

**Tabel 2.3**  
Tenaga Penyuluh di Kabupaten/Kota

NO	INSTANSI	PNS	CPN S	P3 K	THL / APB N	CPN S	APBD/ TK2D/PT T	TOTA L
1	BPTP	11		0	0	0	0	11
2	Paser	60		17	0	0	21	98
3	Kutai Barat	67	3	0	9		87	166
4	Kutai Kartanegara	138		27	0	0	0	165
5	Kutai Timur	131	2	22	5		112	272
6	Berau	33		16	0	0	0	49
7	Penajam Paser Utara	41		11	0	0	13	65
8	Mahakam Hulu	11		0	0		32	43
9	Kota Balikpapan	10		2	1	0	0	13
10	Kota Samarinda	24		5	0	0	0	29
11	Kota Bontang	3		1	0	0	0	4
	JUMLAH	532	5	101	15	0	265	<b>918</b>

**Tabel 2.4**  
Tenaga POPT di Kabupaten/Kota

NO	INSTANSI	THL/ APBN	THL/ APBD	TOTAL
1	Paser	4	1	5
2	Kutai Barat	4	0	4
3	Kutai Kartanegara	11	2	13
4	Kutai Timur	1	0	1
5	Berau	3	0	3
6	Penajam Paser Utara	5	0	5
7	Mahakam Hulu	0	0	0
8	Kota Balikpapan	1	0	1
9	Kota Samarinda	3	0	3
10	Kota Bontang	0	0	0
	JUMLAH	32	3	<b>35</b>

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan. Ke depan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi PNS/ASN melalui pendidikan dan pelatihan baik kerjasama dengan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah maupun instansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana / Aset

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tabel di bawah :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah	2.303	M2
	2 Gedung	2.917	M2 (1 gedung dengan 2 lantai)
	3 Listrik	1	Jaringan
	4 Air	1	Jaringan
	5 Telepon	1	Jaringan
	6 Area Parkir	2	Area
	7 Ruang Rapat	2	Ruang
	8 Ruang Arsip	2	Ruang
	9 Perpustakaan	1	Ruang
	10 Ruang CS	1	Ruang
	11 Komputer	49	Unit
	12 Laptop	44	Unit
	13 Printer	78	Unit
	14 Scanner	7	Unit
	15 Note Book	65	Unit
	16 Tablet PC	10	Unit
	17 Mobil Dinas	2	Unit
	18 Mobil Operasional	7	Unit
	19 Motor Dinas	92	Unit
	20 Kantin	1	Ruang
	21 Website	1	Buah
	22 Papan Pengumuman	1	Buah
	23 Mushola	1	Unit
	24 Alat Kantor dan rumah Tangga	714	Unit
	25 Peralatan olahraga	2	Unit
	26 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	49	Unit
	27 Alat Kedokteran dan Kesehatan	11	Unit
	28 Alat Laboratorium	20	Unit
2)	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah		
	2 Gedung	1	Area
	3 Taman	1	Area
	4 Listrik	1	Jaringan
	5 Air	1	Jaringan
	6 Telepon	1	Jaringan
	7 Area Parkir	2	Area



	8 Ruang Rapat	1	Ruang
	9 Ruang Arsip	1	Ruang
	10 Komputer	4	Unit
	11 Laptop	10	Unit
	12 Printer	12	Unit
	13 Scanner	1	Unit
	14 Mobil Dinas	1	Unit
	15 Mobil Operasional	2	Unit
	16 Motor Dinas	25	Unit
	17 Kantin	1	Area
	18 LED Display	3	Unit
	19 Mushola	1	Area
	Alat Laboratorium		
	20 Mini Soil Devider	1	Unit
	21 Vacum Sealer	1	Unit
	22 Desikator Besar	1	Unit
	23 Analitical Balance	1	Unit
	24 Seed Devider	1	Unit
	25 Seedtrier	3	Unit
	26 Waterbath	1	Unit
	27 Laminar Flow	1	Unit
	28 PH Meter	1	Unit
	29 Micropipete Adjustable 100-1000 $\mu$ l	1	Unit
	30 Micropipete Fixed 5000 $\mu$ l	1	Unit
	31 Thermometer Digital	1	Unit
	32 Oven	1	Unit
	33 Cinometer	1	Unit
	34 Germinator Elektrik	1	Unit
3)	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Gedung	1	Unit
	2 Laboratorium	1	Unit
	3 Pos Jaga	2	Unit
	4 Tempat Parkir	1	Area
	5 PC	31	Unit
	6 Laptop	19	Unit
	7 Note Book	9	Unit
	8 Printer	39	Unit
	9 Genset	2	Unit
	10 Sepeda Motor	12	Unit
	11 Alat Bengkel dan Alat Ukur	10	Unit
	12 Alat Kantor dan rumah Tangga	287	Unit
	13 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21	Unit
	14 Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	Unit
	15 Alat Laboratorium	14	Unit
	16 Drone	1	Unit
	17 Cover Survensace CCTV System	1	Unit
	18 Jalan dan jembatan	1	Unit
4)	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah	40,25	Ha
	2 Gedung	24	Unit
	3 Lantai Jemur	6	Unit
	4 Mess	2	Unit

	5	Sumur Bor	3	Unit
	6	Saluran irigasi (Sprinkle)	3	Blok
	7	Saluran Irigasi (Sawah)	4	Blok
	8	Los Bayangan	2	Unit
	9	Screen House	8	Unit
	10	Taman	2	Buah
	11	Listrik	2	Jaringan
	12	Air	1	Jaringan
	13	Telepon	2	Jaringan
	14	Area Parkir	2	Area
	15	Ruang Rapat	2	Ruang
	16	Ruang CS	1	Ruang
	17	Komputer	6	Unit
	18	Laptop	12	Unit
	19	Printer	7	Unit
	20	Scanner	1	Unit
	21	Mobil Dinas	1	Unit
	22	Mobil Operasional	5	Unit
	23	Motor Dinas	18	Unit
	24	Website	1	Buah
	25	Papan Pengumuman	2	Unit
	26	Mushola	2	Unit
	27	Laboratorium	2	Unit
5)	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian			
	1	Tanah	12,5	Ha
	2	Gedung	1	Unit
	3	Ruang Kerja Widyaiswara dan Penyuluh	1	Unit
	4	Gedung Aula/Ruang Pertemuan	1	Unit
	5	Ruang Kelas	4	Unit
	6	Ruang Kelas IT	1	Unit
	7	Ruang Perpustakaan	1	Unit
	8	Gedung Arsip	1	Unit
	9	Gedung Penyimpanan	1	Unit
	10	Gedung Pengolahan Hasil Pertanian	1	Unit
	11	Ruang Asrama (6 Kamar)	7	Unit
	12	Gedung Guest House (4 Kamar)	1	Unit
	13	Ruang Makan (Kapasitas 100 orang)	1	Unit
	14	Ruang Poli Klinik Kesehatan	1	Unit
	15	Mushola	1	Unit
	16	Rumah Dinas Kepala UPTD	2	Unit
	17	Rumah Dinas	10	Unit
	18	Rumah Penjaga Kebun	3	Unit
	19	Green House	2	Unit
	20	Kandang Ternak Sapi	1	Unit
	21	Kolam Ikan	4	Kolam
	22	Gazebo	4	Unit
	23	Lahan Praktek	5	Ha
	24	Traktor Roda 4	1	Unit
	25	Hand traktor/traktor roda 2	2	Unit
	26	Cultivator	1	Unit
	27	Mobil Dinas/Operasional	7	Unit

28	Motor Dinas	30	Unit
----	-------------	----	------

Sumber : Data Inventarisasi Simda (2023)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kinerja pelayanan Perangkat Dinas (PD) dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan PD sebagai penjabaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian bisa di ukur indikator kerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6

#### Evaluasi Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)			0,52	0,53	0,63	0,64	0,65	0,56	0,63	0,54	0,43	-	107,69	118,87	85,71	67,19	
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD ( SKM ) - (%)			80	85				80	85				100,00	100,00			
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)			12	12				12	12				100,00	100,00			
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu ( unit )			8	8				8	8				100,00	100,00			
Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia (Unit)			21	20				21	20				100,00	100,00			
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)			12	12				12	12				100,00	100,00			
Persentase ASN yang memiliki standar			80	85				80	85				100,00	100,00			
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)			5	5				5	5				100,00	100,00			
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)			28	30				28	30				100,00	100,00			
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (%)			80	80				80	80				100,00	100,00			
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)			10	10				10	10				100,00	100,00			
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)			4	4				4	4				100,00	100,00			
Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)			418	416				418	416				100,00	100,00			
Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)			4	4				4	4				100,00	100,00			
Jumlah cadangan beras provinsi (Ton)			285	325				373,6	195,42				131,09	60,13			
Informasi harga pangan yang tersedia (Laporan)			3	3				3	3				100,00	100,00			
Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan yang dibina (Kelompok)			74	79				74	79				100,00	100,00			
Jumlah laporan PPH konsumsi pangan (Laporan)			1	1				1	1				100,00	100,00			
Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan (Jenis)			7	9				7	9				100,00	100,00			
Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)			5	7				5	7				100,00	100,00			
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)			233.020	240.245				346,78	339				0,15	0,14			
Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)			2,16	2,16									0,00	0,00			
Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi (Unit)			10	15				10	15				100,00	100,00			
Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (Kelompok Tani)			135	135				135	135				100,00	100,00			
Jumlah Produksi Padi (Ton)			422.354	464.589				253.813,37	262,43				60,09	0,06			
Luas tanam padi (Ha)			23.000	24.000				23.000	24.000				100,00	100,00			
Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi (Hari/Ha)			10	9				10	9				100,00	100,00			
Peningkatan indeks pertanaman (IP)			1,2	1,4				1,2	1,4				100,00	100,00			
Jumlah Desa yang dibina (Desa)			696	711				696	711				100,00	100,00			
Jumlah penyuluh yang dibina (Orang)			693	703				693	703				100,00	100,00			
Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih (Orang)			150	150				150	150				100,00	100,00			

Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat (%)		80	81			80	81			100,00	100,00		
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat (Ton)		24	30			24	30			100,00	100,00		
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat (Batang)		5.000	5.500			5.000	5.500			100,00	100,00		
Luas Lahan yang dilayani Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)		150	165			150	165			100,00	100,00		
Jumlah sertifikat/label benih unggul (Label)		5.000	5.000			5.000	5.000			100,00	100,00		
Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan (Rekomendasi)		20	25			20	25			100,00	100,00		
Luas Serangan OPT (Ha)		6.165	6.139			6.165	6.139			100,00	100,00		
Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT (Ha)		23.000	24.000			23.000	24.000			100,00	100,00		
Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani (Unit)		71	72			71	71			100,00	98,61		
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian			80	81	82		80	85,56			100,00	105,63	
Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	24	24		24	24			100,00	100,00	
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			5	5	5		5	5			100,00	100,00	
Jumlah dokumen RKA-SKPD			1	1			5	1			500,00	100,00	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1		-	-					
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1		-	-					
Jumlah dokumen DPA-SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1		-	-					
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1		-	-					
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD					1		-	-					
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			3	3			3	3			100,00	100,00	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3		-	-					
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12	12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12	12	12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	231/12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12	12	12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1		-	-					
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1		-	-					
Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan			3	3			3	3			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					3		-	-					
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			18	18			18	18			100,00	100,00	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					18		-	-					
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	1	1		1	1			100,00	100,00	
Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik					1		-	-					
Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1		-	-					
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai			181	181	181		181	181			100,00	100,00	
Jumlah pakaian dinas yang tersedia			362	362			362	362			100,00	100,00	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya					1		-	-					
Jumlah orang yang mengikuti bimtek			15	15			10	13			66,67	86,67	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					15		-	-					
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	12	12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia			150	150			150	246			100,00	164,00	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1		-	-					
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	12			12	12			100,00	100,00	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					4		-	-					
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			12	12			12	12			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12		-	-					
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah			5	5			5	5			100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5		-	-					
Jumlah aplikasi yang dikelola			2	2			2	2			100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1		-	-					
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah			1	1	1		1	1			100,00	100,00	
Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun			1	1			1	1			100,00	100,00	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1		-	-					
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			20	20			20	20			100,00	100,00	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20		-	-					
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah			12	12	12		12	12			100,00	100,00	
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan			3.500	3.500			3.715	3.626			106,14	103,60	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1		-	-					





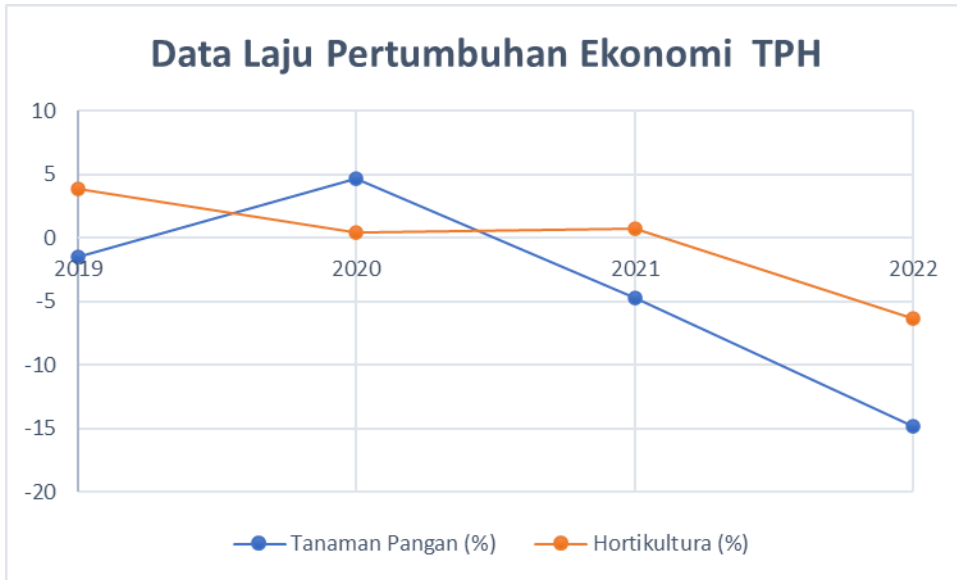


Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6														
Jumlah aplikasi yang dikelola			2	2	-					2	2				100,00	100,00			
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1					-	-								
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah			31	31	31					31	30				100,00	96,77			
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia			31	31	-					31	30				100,00	96,77			
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia					31					-	-								
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan			100	100	-					100	100				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1					-	-								
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan					1					-	-								
Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1					-	-								
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			38	38	-					38	38				100,00	100,00			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya					38					-	-								
Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5					-	5								
Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1					-	-								
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian			80	81	82					80	81				100,00	100,00			
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1					-	-								
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai			85	85	85					85	85				100,00	100,00			
Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTPH			85	85	-					85	85				100,00	100,00			
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					1					-	-								
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1					-	-								
Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1					-	-								
Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan kantor			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4					-	-								
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5					-	-								
Jumlah makan / minum tamu				250	-						250				0,00	100,00			
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					4					-	-								
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3					-	-								
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah			3	4	2					3	4				100,00	100,00			
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia			3	4	-					3	4				100,00	100,00			
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2					-	-								
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan			50	50	-					50	50				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1					-	-								
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan					1					-	-								
Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			12	12	-					12	12				100,00	100,00			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1					-	-								
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12	12	12					12	12				100,00	100,00			
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1	1	-					1	1				100,00	100,00			
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1					-	-								
Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor			1	1	-					1	1				100,00	100,00			
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1					-	-								
1. Jumlah produksi padi			271.356	279.681	289.846					244.425,39	239.425,39				90,08	85,61			
2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura			273.070	283.592	292.383					428,39	316,98				0,16	0,11			
1. Peningkatan produktivitas padi			3,7	3,7	3,7					3,6	3,62				0,01	0,01			
1. Produktivitas Tanaman Hortikultura			22	22,19	22,37					22,34	23,77				101,55	107,12			
Jumlah benih hortikultura yang diadakan			50.000	40.000	45.000					50.000	40.000				100,00	100,00			
Jumlah benih padi yang disediakan			175.000	200.000	212.500					175.000	200.000				100,00	100,00			
Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan			400	750	1.000					400	750				100,00	100,00			
Jumlah hormon hortikultura yang diadakan			500	1.000	2.000					500	1000				100,00	100,00			
Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan			350.000	400.000	425.000					350.000	1.113.980				100,00	278,50			
Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan			18	10	10					18	10				100,00	100,00			
Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan			10	15	17					10	15				100,00	100,00			
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian					2					-	-								
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura			10	10	10					10	10				100,00	100,00			
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan			10	9	9					10	9				100,00	100,00			
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2					-	-								
1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan			7.100	8.000	8.500					7.000	8.000				98,59	100,00			

2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura				6	7	7				6	7				100,00	100,00
1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan				226	226	228				226	464				100,00	205,31
2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitas hortikultura				6	7	7				6	7				100,00	100,00
Luas pengembangan kawasan hortikultura				220	110	120				220	110				100,00	100,00
Luas tanam padi				7.100	8.000	8.500				7.000	8.000				98,59	100,00
Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						2				-	-					
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura				80	120	160				80	120				100,00	100,00
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan				80	60	60				80	60				100,00	100,00
Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura				3	3	3				3	3				100,00	100,00
Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan				4	4	4				4	4				100,00	100,00
Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian						2				-	-					
Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura				1	1	-				1	2				100,00	200,00
Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan				3	3	-				3	3				100,00	100,00
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						2				-	-					
Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura				1	1	-				1	1				100,00	100,00
Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan				3	3	-				3	3				100,00	100,00
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						2				-	-					
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura				1	1	-				1	1				100,00	100,00
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan				3	3	-				3	3				100,00	100,00
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						2				-	-					
Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat				82	82	82				82	82				100,00	100,00
Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat				900	920	940				900	920				100,00	100,00
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman Hortikultura yang bersertifikat				18.000	20.000	-				18.000	20.000				100,00	100,00
Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						1				-	-					
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat				18	18	-				18	18				100,00	100,00
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran						1				-	-					
Jumlah yang dilakukan Renovasi				1	-	-				1	-				100,00	0,00
Jumlah prasarana yang di renovasi				1	-	-				1	-				100,00	0,00
Jumlah UPTD yang dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya				1	-	-				1	-				100,00	
Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi						-										
1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina				85	330	441				85	333				100,00	100,91
2. Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibina				4	4	4				4	4				100,00	100,00
Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat				520	486	456				520	801				100,00	164,81
Jumlah penyuluh yang di bina				435	366	-				436	366				100,23	100,00
Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat				85	120	-				85	120				100,00	100,00
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan						150				-	-					
Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian				97	210	291				97	210				100,00	100,00
Jumlah informasi pertanian tersampaikan				1	4	-				1	4				100,00	100,00
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						1				-	-					
Jumlah petani yang mengikuti bimtek				97	210	-				97	210				100,00	100,00
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan						7				-	-					
Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan				7	6	6				7	6				100,00	100,00
Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk				1	1	-				1	1				100,00	100,00
Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi						1				-	-					
Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan				120	100	-				100	100				83,33	100,00
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi						3				-	-					
Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi				193	219	249				193	219				100,00	100,00
Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi				70	77	78				70	110				100,00	142,86
Jumlah sertifikat/label benih unggul				75	80	-				75	80				100,00	100,00
Jumlah Sertifikat Benih						85				-	-					
Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi				25	30	-				25	30				100,00	100,00
Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						1				-	-					
Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi				55	60	-				55	60				100,00	100,00
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran						1				-	-					
Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi				3	3	3				3	3				100,00	100,00
Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan				3	3	-				3	3				100,00	100,00
Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai						1				-	-					
Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk				30	40	50				30	40				100,00	100,00
Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi				20	20	20				20	20				100,00	100,00
Jumlah kios pertanian yang diawasi				20	30	-				20	30				100,00	100,00
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian						1				1	1					
Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan				35	37	40				35	37				100,00	100,00
Jumlah Pos Agens Hayati yang dikembangkan di PPAH				3	4	-				3	4				100,00	100,00
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme						1				-	-					
Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara				1	1	1				1	1				100,00	100,00
Jumlah luasan bangunan LPHP yangelihara				10.000	10.000	10.000				10.000	10.000				100,00	100,00
Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan				1	2	-				1	2				100,00	100,00
Jumlah Laboratorium yang Dibangun dan Dipelihara						2				-	-					
Luas penanganan OPT DPI				15.000	20.000	30.000				14.879	20.000				99,19	100,00
Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI				1.000	1.200	1.500				1.000	1.200				0,10	0,10
Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan				12	15	-				12	15				100,00	100,00
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan						6.150				-	-					
Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim				2	5	-				2	5				100,00	100,00
Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani						1.000				-	-					

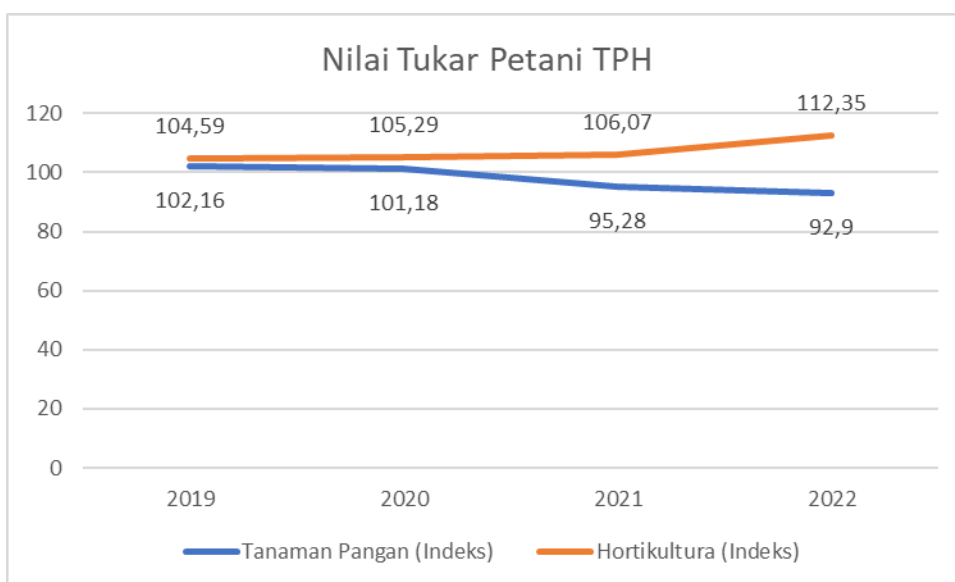
**Tabel 2.7**  
**Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Tahun 2019 – 2022**

Provinsi.	Tahun	Tanaman Pangan (%)	Hortikultura (%)
Kalimantan Timur	2019	-1,52	3,91
	2020	4,64	0,44
	2021	-4,72	0,76
	2022	-14,80	-6,33



**Tabel 2.8**  
**Data Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura**  
**Tahun 2019 – 2022**

Provinsi.	Tahun	Tanaman Pangan (Indeks)	Hortikultura (Indeks)
Kalimantan Timur	2019	102,16	104,59
	2020	101,18	105,29
	2021	95,28	106,07
	2022	92,90	112,35

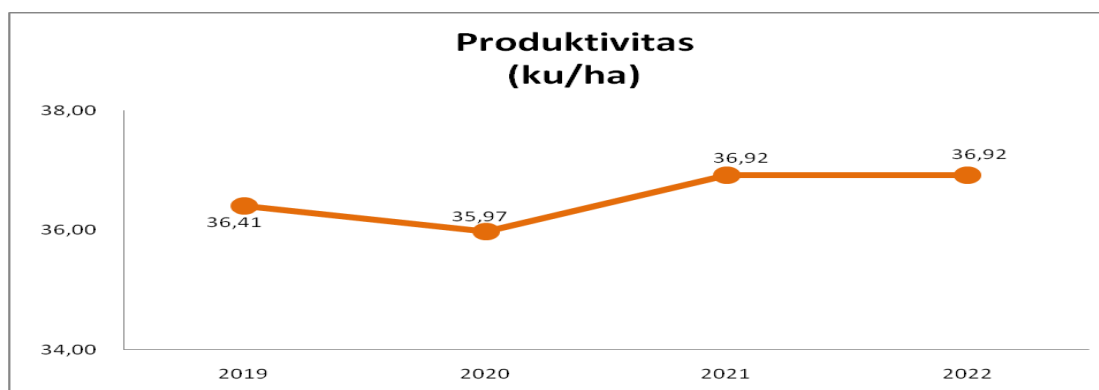
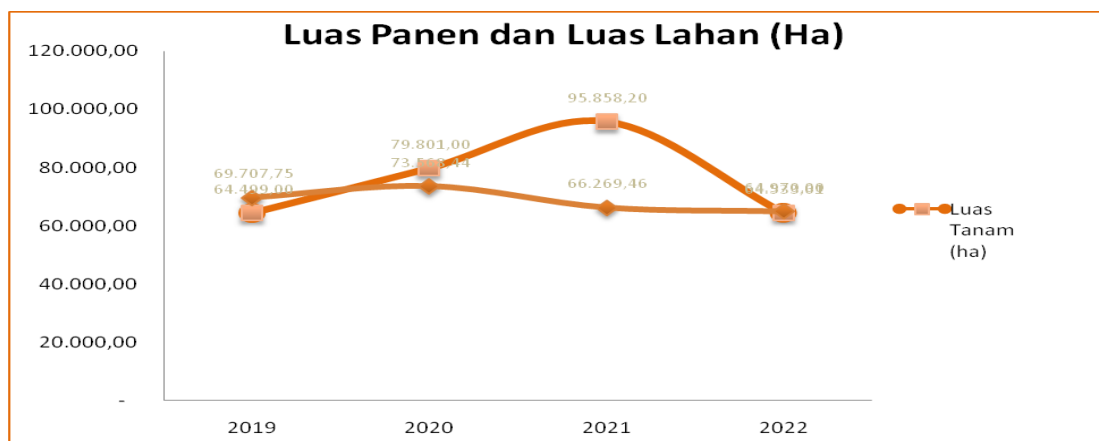
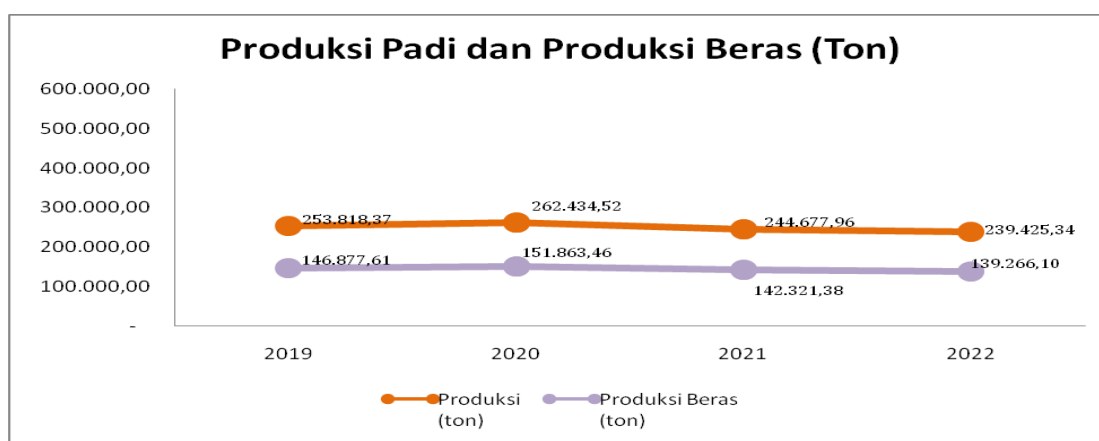


Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 – 2022 (Tabel 2.7) dimana setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan yang cenderung pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada bidang tanaman pangan maupun hortikultura. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan hingga 4,64% pada tanaman pangan namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan kembali. Pada Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 – 2022 (Tabel 2.8) data tanaman pangan dari tahun ke tahun menurun hingga 10% yang pada tahun 2019 pada indeks 102,16 menjadi 92,90 pada tahun 2022 hal ini terjadi pada bidang tanaman pangan dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh besar dalam masyarakat. Berbanding terbalik dengan hortikultura, data nilai tukar petani pada tahun 2019 – 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana di tahun 2019 pada indeks 104,59 menjadi 112,35 pada tahun 2022.

**Tabel 2.9**

Produksi Tanaman Pangan (Padi) dan Hortikultura Tahun 2019 – 2022

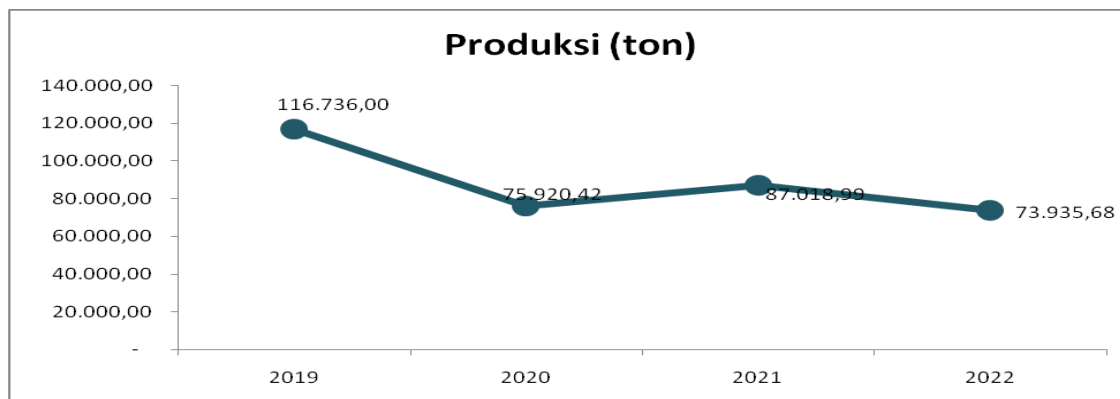
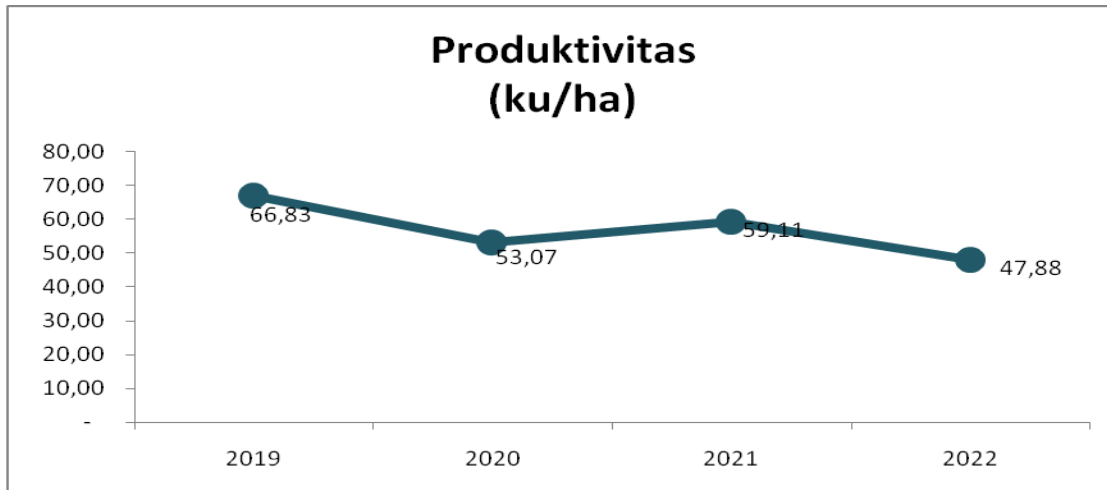
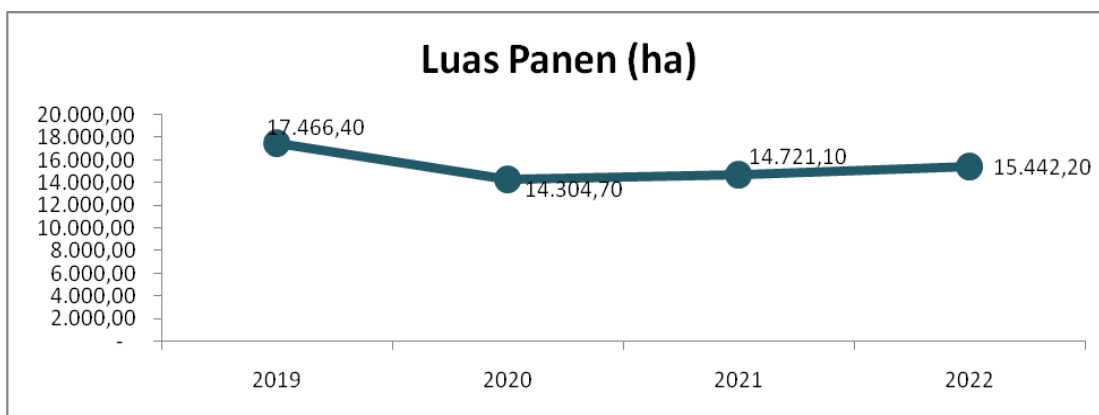
Provinsi	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)	Produksi Beras (ton)
Kalimantan Timur	2019	64.499,00	69.707,75	36,41	253.818,37	146.877,61
	2020	79.801,00	73.568,44	35,97	262.434,52	151.863,46
	2021	95.858,20	66.269,46	36,92	244.677,96	142.321,38
	2022	64.533,61	64.970,00	36,92	239.425,34	139.266,10





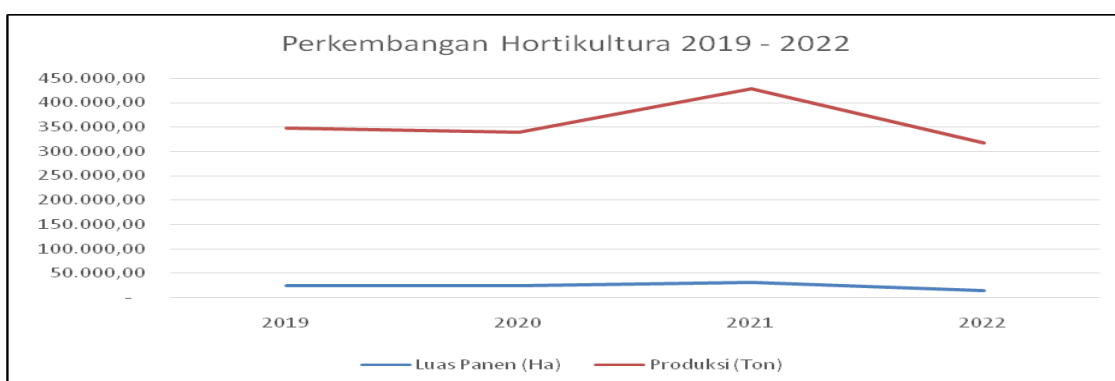
**Tabel 2.10**  
**Data Produksi dan Produktivitas Jagung**  
**Tahun 2019 - 2022**

Provinsi	Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
Kalimantan Timur	2019	17.466,40	66,83	116.736,00
	2020	14.304,70	53,07	75.920,42
	2021	14.721,10	59,11	87.018,99
	2022	15.442,20	47,88	73.935,68



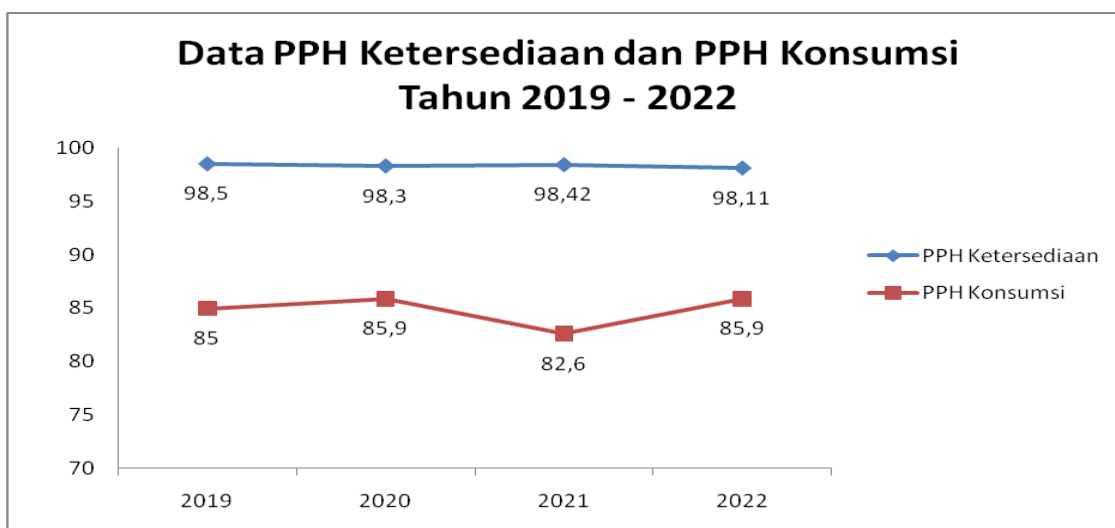
**Tabel 2.11**  
**Data Produksi dan Produktivitas Hortikultura**  
**Tahun 2019 - 2022**

Provinsi.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Kalimantan Timur	2019	23.791,47	346.776,74
	2020	23.157,45	339.372,22
	2021	30.568,76	428.390,38
	2022	13.333,43	351.782



**Tabel 2.12**  
**Data Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi**  
**Tahun 2019 - 2022**

Provinsi.	Tahun	PPH Ketersediaan	PPH Konsumsi
Kalimantan Timur	2019	98,50	85
	2020	98,30	85,9
	2021	98,42	82,6
	2022	98,11	85,9



#### **2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, pada masing-masing program dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.13**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019 - 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada					Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.942.441.600	7.877.566.878				5.620.256.824	7.380.854.311				0,95	0,94	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.028.907.250	3.057.020.440				4.840.787.594	2.831.486.693				0,96	0,93	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.528.550.000	1.617.002.500				2.372.369.639	1.557.935.632				0,94	0,96	-	-	-	-	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1.194.282.344	950.975.000				1.097.605.226	919.033.050				0,92	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.157.491.656	1.608.875.000				4.077.204.701	1.562.534.007				0,98	-	-	-	-	-	-
Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	1.250.000.000	1.268.375.000				1.247.431.612	1.198.710.127				1,00	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	3.020.600.000	2.104.738.680				3.018.999.250	2.103.265.300				1,00	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	11.721.580.000	11.244.512.500				10.744.508.230	9.320.835.041				0,92	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	655.550.000	458.034.350				613.326.511	376.316.830				0,94	-	-	-	-	-	-

Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.907.112.500	555.975.000				2.789.351.098	517.647.180				0,96	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	4.897.210.900	1.554.920.000				4.551.792.010	1.485.274.000				0,93	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	4.985.800.000	5.043.587.800				4.055.158.999	4.843.213.800				0,81	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			59.412.392.959	62.848.976.212				53.848.112.792	57.448.742.068		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			3.664.254.906	3.202.024.900				2.899.200.637	3.016.621.714		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penanganan Kerawanan Pangan			1.389.094.624	1.477.899.800				890.611.559	1.350.343.515		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan Keamanan Pangan			823.486.365	1.194.487.600				703.122.338	1.162.055.327		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			27.761.787.000	46.197.098.000				21.528.500.019	41.341.760.168		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			10.369.960.500	3.742.256.987				8.029.355.967	3.531.727.349		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyuluhan Pertanian			6.149.929.725	3.616.662.000				4.787.423.236	3.522.700.804		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian											-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
			848.540.921	594.518.000				784.544.750	562.898.950								
Belanja Gaji dan Tunjangan	37.415.724.094	36.384.821.000				32.122.420.864	30.268.603.562				-	0,83	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>85.705.250.344</b>	<b>73.726.404.148</b>	<b>110.419.447.000</b>	<b>122.873.923.499</b>		<b>77.151.212.558</b>	<b>64.365.709.533</b>	<b>93.470.871.298</b>	<b>111.936.849.895</b>		<b>0,90</b>	<b>0,87</b>	<b>0,85</b>	<b>0,91</b>			

Pada tabel 2.13 diatas dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur untuk rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019, hampir semua program realisasinya baik, dimana realisasinya berkisar antara 80% – 90%.

Untuk tahun 2022, 2021 dan tahun 2022 rasio antara realisasi dan anggaran dari seluruh program yang dilaksanakan telah mencapai angka 80% keatas dari target anggaran yang sudah ditentukan. Faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi yaitu perencanaan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, tersedianya SDM yang terampil dan kompeten serta adanya sarana dan prasarana yang memadai.

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat**

### **Daerah**

Dari sisi produksi dan produktivitas komoditas prioritas tanaman pangan dan hortikultura memiliki tantangan dan peluang masing-masing. Sampai dengan tahun 2023 rata-rata capaian kinerja untuk mencapai ketersediaan beras (periode Renstra 2024 - 2026) baru mencapai 49,06 %, hal ini menyebabkan tingkat produksi belum memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kaltim, dari 10 Kabupaten/Kota yang ada, hal ini disebabkan antara lain peningkatan produksi padi/beras lebih kecil dibanding jumlah penduduk Kalimantan Timur, sehingga untuk mencukupinya Provinsi Kalimantan Timur masih mendatangkan beras dari luar Provinsi.

Terkait dengan Rentra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 ada 9 (sembilan) sasaran startegis yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima



9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Bahwa dari sembilan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini menjadi faktor pendorong jajaran Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk bekerjasama, sinergis mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI.

Terkait dengan Renstra Kabupaten/Kota bahwa dari 10 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menjadi Sentra Pengembangan Kawasan Padi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, Berau, dan Kota Samarinda. Sentra Pengembangan Jagung di Kab. Berau, Kukar, Kutim. Sentra Pengembangan Kawasan Hortikultura ada 8 (delapan) yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, Berau, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRW) Tahun 2016-2036 bahwa luas kawasan tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.096 Ha. Data LBS 2019 Kalimantan Timur seluas 40.405,70 Ha, mengalami koreksi pada tahun 2020 menjadi 39.513,96 Ha (4,57 %).

Menteri Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Permentan Nomor : 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dan Kepmentan Nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Penyusunan Master Plan Kawasan Pertanian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis Korporasi Petani. Kedepan Master Plan ini harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Action Plan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang fokus pengembangannya pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. keberadaan Master Plan dan Action Plan ini kelak akan menjadi faktor penentu dalam pendanaan kegiatan dan alokasi program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura.

**Tabel 2.14**

**Luas Baku Sawah Nasional Kaltim Per-Kecamatan Tahun 2019 – 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Ha	
			2019	2020
<b>1</b>	<b>Balikpapan</b>		<b>135,6</b>	<b>34,71</b>
		Kec. Balikpapan Timur	135,6	34,71
<b>2</b>	<b>Berau</b>		<b>1919,0</b>	<b>1860,39</b>
		Kec. Biatan	102,7	149,08
		Kec. Gunung Tabur	583,6	511,07
		Kec. Sambaliung	616,7	444,33
		Kec. Tabalar	290,6	359,30
		Kec. Talisayan	60,9	42,97
		Kec. Tanjung Redeb	4,0	
		Kec. Teluk Bayur	260,5	249,46
		Segah		104,18
<b>3</b>	<b>Bontang</b>		<b>65,2</b>	<b>12,18</b>
		Kec. Bontang Selatan	62,4	12,18
		Kec. Bontang Utara	2,8	
<b>4</b>	<b>Kutai Barat</b>		<b>171,9</b>	<b>2206,70</b>
		Kec. Barong Tongkok	44,0	57,44
		Kec. Bongan	103,6	87,52
		Kec. Long Iram	16,9	219
		Kec. Muara Pahu	2,9	231,96
		Kec. Nyuatan	4,6	
		Mook Mnor Bulatn		259,15
		Penyinggahan		168,35
		Siluq Ngurai		2,88
		Tering		1180,40
<b>5</b>	<b>Kutai Kartanegara</b>		<b>18757,4</b>	<b>15305,15</b>
		Kec. Anggana	725,5	744,37
		Kec. Kembang Janggut	38,4	2,9
		Kec. Kenohan	1085,5	
		Kec. Kota Bangun	1412,8	907,55
		Kec. Loa Janan	95,5	372,90
		Kec. Loa Kulu	3050,9	2685,83
		Kec. Loajanan	355,0	
		Kec. Marangkayu	1461,6	1473,81
		Kec. Muara Badak	129,2	59,96
		Kec. Muara Jawa	184,3	123,89
		Kec. Muara Kaman	1429,0	1424,13
		Kec. Muara Muntai	9,6	1,35
		Kec. Muara Wis	112,6	37,16
		Kec. Samboja	1086,0	726,32
		Kec. Sanga-Sanga	332,0	222,41
		Kec. Sebulu	1469,5	1194,92
		Kec. Tabang	29,9	22,61
		Kec. Tenggarong	1359,5	1585,86
		Kec. Tenggarong Seberang	4390,5	3719,17
<b>6</b>	<b>Kutai Timur</b>		<b>2638,8</b>	<b>2784,82</b>
		Kec. Bengalon	60,3	148,73
		Kec. Busang	6,5	8,24
		Kec. Kaliorang	758,4	701,15
		Kec. Karangan	113,3	109,29
		Kec. Kaubun	715,4	726,84
		Kec. Kombeng	223,4	238,74
		Kec. Long Mesangat	198,6	181,21
		Kec. Muarabangkal	54,6	53,73
		Kec. Muarawahau	0,7	14,90

		Kec. Rantau Pulung	234,6	167,79
		Kec. Sandaran	10,7	10,69
		Kec. Sangatta Selatan	56,6	132,76
		Kec. Sangkulirang	16,3	68,86
		Kec. Teluk Pandan	189,3	205,33
		Muara Ancalong		1,98
		Telen		14,60
<b>7</b>	<b>Mahulu</b>		<b>24,4</b>	<b>79,42</b>
		Kec. Long Hubung	24,4	79,42
<b>8</b>	<b>Paser</b>		<b>7062,3</b>	<b>6577,61</b>
		Kec. Kuaro	331,9	70,35
		Kec. Longikis	448,3	414,66
		Kec. Longkali	3779,5	3208,66
		Kec. Muara Balengkong	1373,3	
		Kec. Paser Balengkong	148,0	1659,92
		Kec. Tanah Grogot	981,3	
		Tana Paser		1224,03
<b>9</b>	<b>Penajam Paser Utara</b>		<b>8672,5</b>	<b>9233,88</b>
		Kec. Babulu	6544,1	7002,26
		Kec. Penajam	1081,0	1018,54
		Kec. Sepaku	477,0	625,27
		Kec. Waru	570,4	587,80
<b>10</b>	<b>Samarinda</b>		<b>1958,5</b>	<b>1322,87</b>
		Kec. Loa Janan Ilir	283,1	233,14
		Kec. Palaran	488,4	360,97
		Kec. Samarinda Seberang	8,8	7,42
		Kec. Samarinda Ulu	3,5	
		Kec. Samarinda Utara	834,6	450,29
		Kec. Sambutan	340,1	265,69
		Sungai Kunjang		3,15
		Sungai Pinang		2,20
	<b>Total</b>		<b>41405,7</b>	<b>39417,73</b>

## 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ke depan

Tugas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa dalam 3 (tiga) tahun ke depan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta penganeekaragaman pangan melalui peningkatan produksi, produktifitas, mutu produk dan nilai tambah untuk menuju ketahanan pangan

khususnya beras, peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas, terukur dan berkelanjutan.

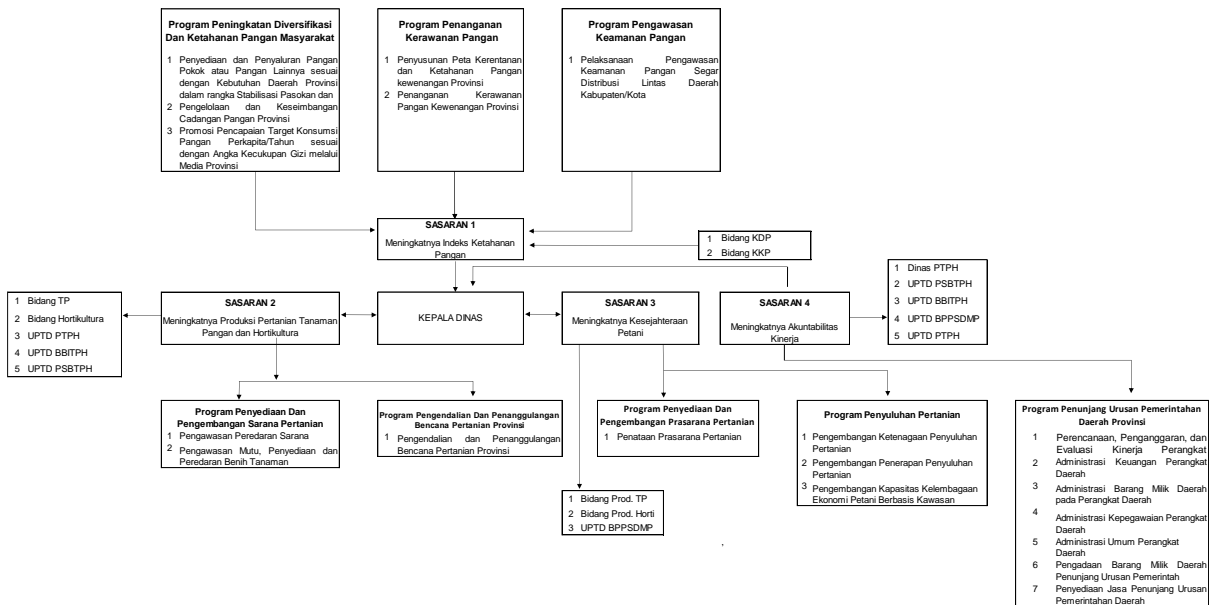
Sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya, seperti pemanfaatan Sistem Pelaporan TEPRA, Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, Provinsi Kalimantan Timur terus dipacu mengingat hasil kerja Perangkat Daerah sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan aparaturnya.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang mampu berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

## **2.7. Hubungan Internal dan Eksternal**

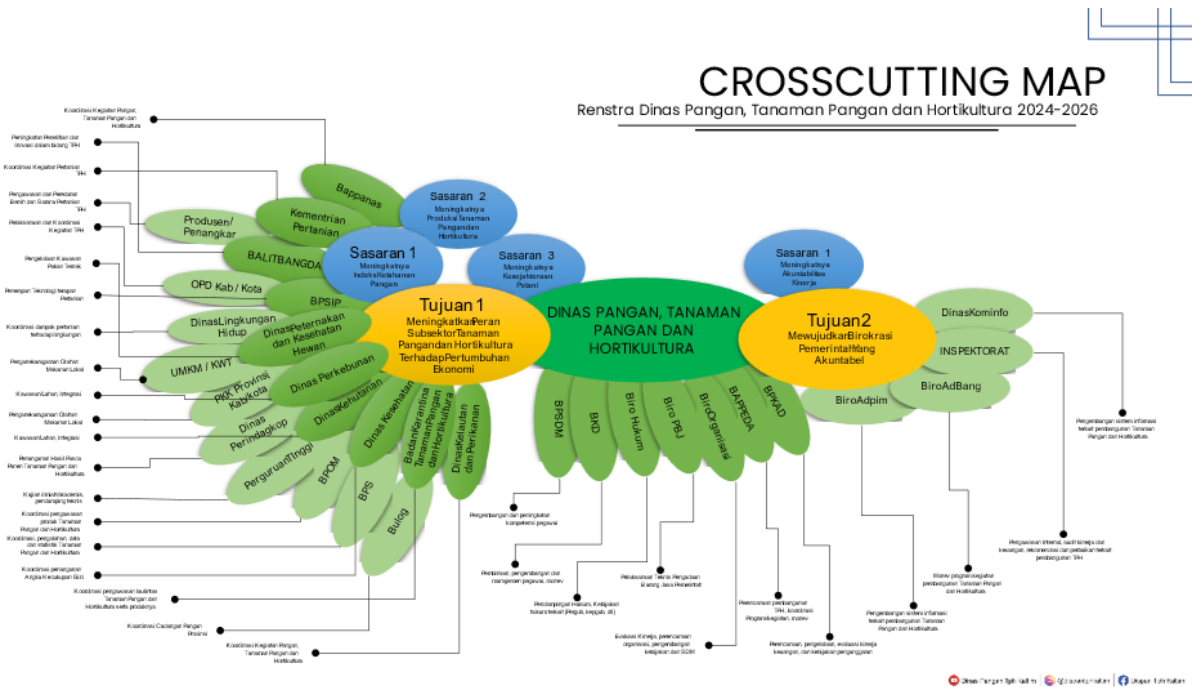
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai kinerja yang ideal. Dalam pelaksanaan kinerja program dan kegiatan di dalam hubungan internal sangat diperlukan sekali. Adapun hubungan kerja internal Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.15**  
Crosscutting internal Dinas Pangan, TPH Prov Kaltim



Untuk hubungan dengan pihak lain Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.16**  
Crosscutting External Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PANGAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi  
Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur**

Untuk melakukan identifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor – faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan di pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan penanggulangan Inflasi masih kurang  
Kurangnya ketersediaan sumber karbohidrat membuat masyarakat banyak yang sulit untuk mendapatkannya dimana akhirnya terjadi inflasi, untuk itu diperlukan beberapa kegiatan untuk menanggulangi inflasi dengan cara gelar pasar murah dengan melibatkan beberapa stakeholder.
2. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian  
Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada dengan memaksimalkan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten / kota terkait LP2B.
3. Masih rendahnya produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura  
Tingginya biaya produksi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura menjadi salah satu akar permasalahannya yang harus dicarikan solusi dalam meningkatkan produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta perlunya penggunaan atau ketersediaan benih unggul yang bermutu dan bersertifikat untuk mengurangi gangguan dalam

usaha tani komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan pangan untuk IKN.

4. Keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang masih rendah  
Meningkat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan keberagaman konsumsi pangan, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilitasi harga pangan dan meningkatkan cadangan pangan; mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Lemahnya akses distribusi dan stabilisasi pasokan pangan  
Panjangnya rantai distribusi membuat kurang lancarnya rantai pasokan pangan, oleh sebab itu perlunya menjaga kelancaran rantai pasokan pangan dimana perlunya melibatkan interaksi disektor pertanian mulai dari petani, benih, pupuk, pabrik pengolahan, pengiriman hingga pedagang dan tersedianya bahan pokok strategis dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan masyarakat.
6. Kualitas pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura masih rendah  
Sarana pertanian untuk pasca panen yang saat ini untuk meningkatkan nilai tambah masih sangat rendah. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan hasil pasca panen petani dengan menyediakan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan baik.
7. Makin berkurangnya Sumberdaya Manusia Pertanian  
Dengan meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat tani dipasar regional dan pasar global, petani dituntut merubah pola pikir dan prilaku dari petani tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis maka jumlah dan kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Pengawas Benih



Tanaman (PBT) perlu ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan dan penerimaan pegawai/petugas pertanian baru.

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; sehingga dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Cadangan Pangan Provinsi belum optimal
2. Diversifikasi Konsumsi pangan masih rendah
3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal
4. Mendukung gerakan pengendalian inflasi
5. Mendukung penanganan kemiskinan dan stunting
6. Ketersediaan benih unggul bersertifikat masih kurang
7. Pemenuhan pangan untuk IKN belum optimal
8. Akses infrastruktur pertanian masih kurang
9. Penanganan serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang belum optimal
10. Penguatan data pangan berbasis geospasial belum optimal
11. Akses petani terhadap teknologi dan informasi masih terbatas
12. Akses pemasaran hasil produksi masih terbatas
13. Biaya produksi tinggi
14. Kelembagaan petani yang belum optimal

**Tabel 3.1**

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat ketahanan pangan kaltim yang masih belum optimal	Ketersediaan pangan yang belum optimal	ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan penanggulangan inflasi masih kurang
		pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal belum optimal
		diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih rendah
	Akses distribusi	akses pangan pada kondisi tertentu terbatas

	dan stabilisasi pasokan pangan masih lemah	panjangnya rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan
Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang	alih fungsi lahan pertanian bertambah
	Kurangnya infrastruktur pendukung	jaringan irigasi terbatas
	Rendahnya daya saing produk TPH	penerapan teknologi pertanian belum optimal ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam daerah masih kurang
Tingkat kesejahteraan petani masih belum optimal	Tingginya biaya produksi TPH	mahalnya harga pupuk dan pemenuhan pangan untuk IKN yang masih kurang
	Sdm pertanian berkurang	berkurangnya minat generasi muda dibidang usaha tani
Tingkat akuntabilitas kinerja belum maksimal	Belum optimalnya kualitas tata kelola internal	masih rendahnya pengukuran pelaksanaan dokumen perencanaan yang ditetapkan
		pengelolaan barang milik daerah belum optimal
		kapasitas pegawai masih kurang
<b>ISU STRATEGIS</b>		
Ketahanan Pangan Kaltim	Peningkatan produksi dan produktivitas TPH	Kesejahteraan petani TPH
1. Cadangan pangan provinsi belum optimal	1. Ketersediaan lahan usaha tani berkurang	1. Akses petani terhadap teknologi dan informasi masih terbatas
2. Akses pangan yang belum merata	2. Ketersediaan benih unggul bersertifikat masih kurang	2. Akses pemasaran hasil produksi masih terbatas
3. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah	3. Akses petani terhadap pupuk masih terbatas	3. Biaya produksi tinggi
4. Pengawasan keamanan pangan belum optimal	4. Akses infrastruktur pertanian masih	4. Kelembagaan petani yang belum optimal
		5. Pemenuhan pangan

5. Mendukung gerakan pengendalian inflasi	kurang	untuk IKN belum optimal
6. Mendukung penanganan kemiskinan dan stunting	5. Penanganan serangan OPT dan dampak perubahan iklim belum optimal 6. Penguatan data pangan berbasis geospasial belum optimal	

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024). RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi

berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (Biorevolution). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organism pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai fungsinya tersebut. SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Selain itu sektor – sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian tenaga kerja terutama di pedesaan dan pesisir.

Dampak perubahan iklim menjadi sangat penting untuk diantisipasi dalam rangka pemanfaatan data curah hujan untuk kepentingan pengaturan pola tanam. Diperlukan kerjasama secara berkelanjutan dengan BMKG sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap data iklim.

Isu – isu strategis KLHS yang terkait sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah alih fungsi lahan ( hutan dan pertanian ), perubahan iklim, penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, kesejahteraan rakyat, pertanian dan ketahanan pangan.

### 3.4 Program Unggulan

Program unggulan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah Pengembangan kawasan hortikultura dengan komoditi : Pisang (Kutai Timur, Paser dan Kutai Kartanegara dan Berau). Program unggulan diatas sangatlah penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di kawasan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

**Tabel 3.2**

Program Unggulan Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura  
Tahun 2024 2026

NO	KOMODITI	PROVINSI / KABUPATEN	LUAS PANEN (Ha)			Target Produksi (ton)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	PISANG	KUTAI TIMUR	60	100	120	4.500	7.500	9.000
		KUTAI KARTANEGARA	30	50	60	2.250	3.750	4.500
		PASER	40	70	100	3.000	5.250	7.500
		BERAU	20	30	70	1.500	2.250	5.250
	Jumlah		150	250	350	9.750	16.500	21.000

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu : Tujuan (2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Sasaran (5) Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi , Indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (%), maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan :

1. Meningkatkan peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi

Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan

Indikator : - Nilai Akuntabilitas Kinerja (Poin)

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)

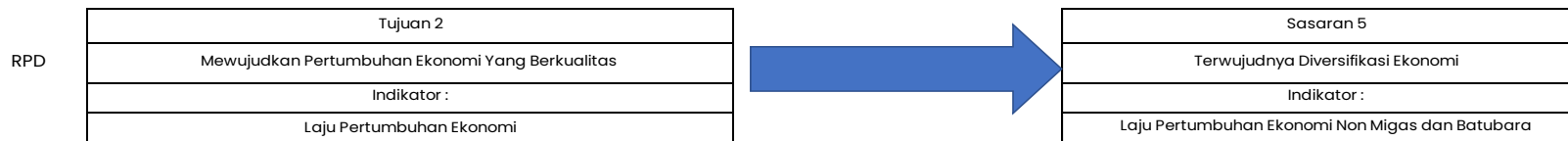
Sasarannya adalah :

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026



RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara	Meningkatnya indeks ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,5	77,65	77,85	77,95	78,05
Indikator :		Produksi Tanaman Pangan (Ton)					
LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Padi	239,435	289,846	239.505	239.580	239.680
2024 2025 2026		- Jagung	73,936	73.986	74.186	74.686	75.686
Tanaman Pangan 0,70 0,80 0,94		Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	351.782	292,383	369.371	387.840	407.232
Hortikultura 1,29 1,72 1,88	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Indeks)					
		- tanaman pangan	92,90	92,95	93,00	93,06	93,12
		- hortikultura	112,35	112,55	112,75	113	113,25
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas							
Indikator :							
1. Akuntabilitas Kinerja (Poin)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	1. Akuntabilitas Kinerja (Poin)	64,10	64,10	70,02	72,25	74,00
2024 2025 2026							
78,50 79,30 80,01							
2. Kepuasan Masyarakat (Poin)		2. Kepuasan Masyarakat (Poin)	88,56	82,00	88,58	88,65	88,80
2024 2025 2026							
85,00 85,50 86,00							

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan (2) "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas" dan menjalankan Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu pada sasaran (5) "Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi". Tujuan yang ingin dicapai yaitu 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan, Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja melalui strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel berikut ini :



**Tabel 5.1**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>TUJUAN (2)</b>	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas		
<b>SASARAN (5)</b>	Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		
<b>INDIKATOR</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (%)		
<b>TUJUAN / SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
[ TUJUAN ] 1 Meningkatkan Peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi	LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		
[ SASARAN ] 1.1 Meningkatnya indeks ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan (indeks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Diversifikasi Pangan</li> <li>2. Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>3. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</li> <li>2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan</li> <li>3. Peningkatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</li> <li>4. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar</li> <li>5. Penyediaan Cadangan Pangan</li> </ol>

<p>[ SASARAN ] 1.2 Meningkatnya produksi tanamn pangan dan hortikultura</p>	<p>[ Indikator ] 1 Produksi tanman pangan - Padi (ton) - Jagung (ton)</p>	<p>1. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian 2. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>	<p>1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura 2. Peningkatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme 4. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>
<p>[ Indikator ] 2 Produksi Tanaman Hortikultura (ton)</p>			
<p>[ SASARAN ] 1.3 Meningkatnya kesejahteraan petani</p>	<p>Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Indeks) - Tanaman Pangan - Hortikultura</p>	<p>1. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Peningkatan Penyuluhan Pertanian</p>	<p>1. Peningkatan Penataan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Peningkatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3. Peningkatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan pertanian 4. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Petani Berbasis Korporasi</p>

<p><b>[ TUJUAN ] 2</b>  <b>Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan</b></p>	<p><b>[ Indikator ] 1</b>                  Nilai akuntabilitas Kinerja (Poin)</p>		
	<p><b>[ Indikator ] 2</b>                  Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)</p>		
<p>[ SASARAN ] 1.4                  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>[ Indikator ] 1                  Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)</p>	<p>1. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Ketatalaksanaan</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Perencanaan                  2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan                  3. Peningkatan Kualitas Penanganan Aset                  4. Peningkatan Kualitas SDM ASN</p>
	<p>[ Indikator ] 2                  Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)</p>		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, maka langkah – langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi Daerah :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
  - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pasar
  - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
  - c. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - a. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
  - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
  - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - a. Penataan Prasarana Pertanian

7. Program Penyuluhan Pertanian
  - a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
  - b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
  - c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Dari program diatas yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian

Program di atas disusun berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah yang merupakan acuan bagi penyusunan Program Kesekretariatan, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada periode 3 (tiga) tahun ke depan (2024 - 2026). Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan untuk tahun 2024-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050\_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat		<b>TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN</b>					112.124.646.000		112.624.146.000		113.135.641.000	
		02:09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					7.000.000.000		7.070.000.000		7.140.350.000	
		01:00	<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>					68.334.646.000		70.381.793.000		70.522.513.000	
		02:09:01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,45	82	61.334.646.000	82,7	61.189.793.000	83,4	61.258.163.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.640.000.000	100	1.864.853.000	100	1.878.853.000	
		2.09.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>	%	90	90	1.139.136.000	90	1.175.253.000	90	1.192.273.000	
		2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	800.000.000	5	821.117.000	5	821.117.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	8.800.000	2	8.800.000	2	8.800.000	Samarinda
		2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	8.800.000	2	8.800.000	2	8.800.000	Samarinda
		2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	93.960.000	4	93.960.000	4	93.960.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	227.576.000	4	242.576.000	4	259.596.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	%	91,20	91,25	54.466.185.680	91,27	54.611.000.000	91,40	54.711.000.000	
		2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	220	200	53.700.185.680	187	53.800.000.000	179	53.900.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	450.000.000	12	495.000.000	12	495.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah		
2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	Samarinda		

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>2.09.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>45</b>	<b>45,5</b>	<b>92.250.000</b>	<b>45,7</b>	<b>97.250.000</b>	<b>48</b>	<b>102.250.000</b>	
		2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	47.250.000	1	52.250.000	1	57.250.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>285.000.000</b>	<b>85</b>	<b>358.000.000</b>	<b>85</b>	<b>366.000.000</b>	
		2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	17	100.000.000	19	108.000.000	20	116.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.135.000.000</b>	<b>90</b>	<b>1.347.853.000</b>	<b>90</b>	<b>1.349.853.000</b>	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	150	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30	20.000.000	32	20.000.000	35	20.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14	25.000.000	16	25.000.000	18	25.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	177	830.000.000	187	1.042.853.000	197	1.044.853.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	4	85.000.000	4	85.000.000	6	85.000.000	Samarinda
		<b>2.09.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan BMD</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.969.220.000</b>	<b>90</b>	<b>1.446.835.680</b>	<b>90</b>	<b>1.385.185.680</b>	
		2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	4	1.669.220.000	6	675.000.000	6	675.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80	300.000.000	60	771.835.680	70	710.185.680	Samarinda
		<b>2.09.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>2.970.854.320</b>	<b>90</b>	<b>2.982.854.320</b>	<b>90</b>	<b>2.994.854.320</b>	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	470.000.000	1	482.000.000	1	494.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.465.854.320	1	2.465.854.320	1	2.465.854.320	Samarinda

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>2.09.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>917.000.000</b>	<b>90</b>	<b>1.035.600.000</b>	<b>90</b>	<b>1.035.600.000</b>	
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	16	175.000.000	16	175.000.000	17	175.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28	375.000.000	28	375.000.000	28	375.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	72	150.000.000	73	150.000.000	73	150.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6	150.000.000	4	268.600.000	3	268.600.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	10	52.000.000	10	52.000.000	13	52.000.000	Samarinda
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	<b>02:09:03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</b>	<b>Skor</b>	<b>96,8</b>	<b>97,6</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>97,75</b>	<b>1.220.000.000</b>	<b>97,8</b>	<b>1.250.000.000</b>	
				<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>	<b>85,9</b>	<b>86,3</b>	<b>2.175.000.000</b>	<b>86,5</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>86,7</b>	<b>2.230.000.000</b>	
		<b>2.09.03.1.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam</b>	<b>Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>600.000.000</b>	<b>12</b>	<b>670.000.000</b>	<b>12</b>	<b>700.000.000</b>	
		2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	kegiatan	4	4	125.000.000	5	150.000.000	6	170.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	laporan	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Laporan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia</b>	<b>%</b>	<b>86,95</b>	<b>88,83</b>	<b>500.000.000</b>	<b>92,07</b>	<b>550.000.000</b>	<b>96,61</b>	<b>550.000.000</b>	
		2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	222,42	300	150.000.000	300	200.000.000	12	200.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.03.1.04</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>	<b>Media Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</b>	<b>Media</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.175.000.000</b>	<b>3</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>3</b>	<b>2.230.000.000</b>	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	855.562.500	1	862.500.000	1	867.250.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah		



TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi. Edukasi. dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	4	4	668.920.000	4	670.000.000	4	680.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	650.517.500	1	667.500.000	1	682.750.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>02:09:04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Daerah Rawan Pangan</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000.000</b>	
				<b>Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2.100.000.000</b>	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	Laporan	1	1	300.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	300.000.000	2	215.000.000	2	220.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	Kecamatan	10	10	2.100.000.000	10	2.100.000.000	10	2.100.000.000	
		2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>02:09:05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	<b>%</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>86</b>	<b>1.335.000.000</b>	<b>87</b>	<b>1.340.350.000</b>	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	15	16	1.325.000.000	18	1.335.000.000	20	1.340.350.000	
		2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	11	157.800.000	12	158.840.000	13	159.396.400	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4	130.247.500	5	131.230.500	6	131.756.405	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Yang Dibina	Dokumen	1	1	581.012.500	1	585.397.500	1	587.743.475	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Paket	1	1	340.002.500	1	342.719.500	1	344.173.095	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kab/Kota	Laporan	1	1	115.937.500	1	116.812.500	1	117.280.625	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	<b>01:00</b>	<b>UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>					<b>4.200.000.000</b>		<b>4.222.000.000</b>		<b>4.224.000.000</b>	
		<b>02:09:01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	3.616.580.000	82	3.616.580.000	82,8	3.615.960.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	583.420.000	100	605.420.000	100	608.040.000	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	115.680.000	100	115.680.000	100	115.680.000	
		2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	115.680.000	12	115.680.000	12	115.680.000	Loa Janan/Rempanga

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>2.09.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	295.900.000	100	295.900.000	100	295.900.000	
		2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	61.000.000	1	61.000.000	1	61.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	12	234.900.000	18	234.900.000	22	234.900.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	342.500.000	100	342.500.000	100	342.500.000	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	320.000.000	12	320.000.000	12	320.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	
		2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	330.000.000	3	330.000.000	3	330.000.000	Loa Janan/Rempanga
		<b>2.09.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	2.440.920.000	100	2.462.920.000	100	2.465.540.000	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	228.920.000	1	250.920.000	1	253.540.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	Loa Janan/Rempanga
		<b>2.09.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	575.000.000	100	575.000.000	100	574.380.000	
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	249.380.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	Loa Janan/Rempanga

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					2.650.500.000		2.685.000.000		2.690.000.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	2.227.579.850	82	2.240.520.840	82,8	2.232.722.040	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	422.920.150	100	444.479.160	100	457.277.960	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	85	90	88.560.000	90	88.560.000	90	88.560.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	88.560.000	1	88.560.000	1	88.560.000	Samarinda
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	90	203.523.600	90	224.644.600	90	231.406.800	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.323.600	1	10.044.600	1	19.006.800	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	187.200.000	1	214.600.000	1	212.400.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	90	90	59.700.810	90	1.870.000	90	54.444.400	
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	59.700.810	1	1.870.000	2	54.444.400	Samarinda
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	95	95	1.687.814.390	95	1.652.252.400	95	1.694.289.000	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	15.958.550	1	13.396.560	1	16.433.160	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	169.438.000	1	169.438.000	1	169.438.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	34.000.000	1	37.000.000	1	40.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.468.417.840	1	1.432.417.840	1	1.468.417.840	Samarinda
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	90	90	610.901.200	90	717.673.000	90	621.299.800			
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	9	121.877.200	9	110.092.000	9	121.877.000	Samarinda		
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	489.024.000	1	607.581.000	1	499.422.800	Samarinda		
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.950.000.000		1.950.000.000		1.965.825.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	1.631.608.000	82	1.619.730.000	82,8	1.634.305.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	318.392.000	100	330.270.000	100	331.520.000	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	91,20	91,25	81.000.000	91,27	81.000.000	91,40	81.000.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	81.000.000	1	81.000.000	1	81.000.000	Samarinda

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<b>2.09.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	85	85	156.120.000	85	127.492.000	85	132.520.000	
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	25	156.120.000	26	127.492.000	27	132.520.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		<b>2.09.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	90	151.400.000	90	158.100.000	90	159.600.000	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	50	3.500.000	55	4.500.000	60	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	16.000.000	12	16.500.000	12	16.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	7	122.400.000	8	126.600.000	8	126.600.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	Samarinda
		<b>2.09.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan BMD	%	90	90	90.000.000	90	92.000.000	90	87.000.000	
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31	32	90.000.000	33	92.000.000	34	87.000.000	Samarinda
		<b>2.09.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	90	90	1.101.824.160	90	1.107.002.160	90	1.106.752.160	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	162.992.000	1	167.670.000	1	167.920.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	934.832.160	1	934.832.160	1	934.832.160	Samarinda
		<b>2.09.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	90	90	369.655.840	90	384.405.840	90	398.952.840	
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	66.614.000	13	66.614.000	13	66.614.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	70.000.000	12	75.000.000	12	72.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	12	233.041.840	12	242.791.840	12	260.338.840	Samarinda
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	<b>01.00</b>	<b>UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>					3.302.250.000		3.323.250.000		3.325.000.000	
		<b>02.09:01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	2.461.000.000	82	2.411.000.000	82,8	2.415.000.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	841.250.000	100	912.250.000	100	910.000.000	
		<b>2.09.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi anggaran	%	86,00	88,00	85.000.000	88,00	85.000.000	88,00	85.000.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	Samarinda
		<b>2.09.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	82,00	83,80	290.000.000	83,00	290.000.000	83,00	290.000.000	



TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Tanaman Pangan Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	13.948.901.250	2	14.300.338.570	2	14.472.088.570	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Dokumen	2	2	2.451.098.750	2	2.352.098.750	2	2.293.798.750	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	1	1.600.000.000	1	1.492.562.680	1	1.492.562.680	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Kesejahteraan Petani		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan</b>	%	36,37	41,39	1.750.000.000	41,76	1.750.000.000	41,81	1.780.000.000	
				<b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura</b>	%	26	34,0	1.450.000.000	43,0	1.450.000.000	52,0	1.455.000.000	
		3.27.03.1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan</b>	Unit	5	6	1.750.000.000	7	1.750.000.000	7	1.780.000.000	
				<b>Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura</b>	Unit	1	2	1.450.000.000	3	1.450.000.000	3	1.455.000.000	
		3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	2	1.200.773.500	2	1.200.773.500	2	1.206.776.500	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	2	133.002.600	2	133.002.600	2	135.657.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	2	133.321.600	2	133.321.600	2	135.976.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	331.720.000	2	331.720.000	2	341.720.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	120	150	1.069.623.300	250	1.069.623.300	350	1.072.320.500	
		3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.550.000	
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	2	131.559.000	3	131.559.000	3	132.000.000			

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.000.000.000		2.040.000.000		2.100.000.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,20	11,55	700.000.000	11,95	740.000.000	13,07	800.000.000	
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	20,00	30,33	1.300.000.000	50	1.300.000.000	66,67	1.300.000.000	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	Ha	920	935	2.000.000.000	960	2.040.000.000	985	2.100.000.000	
		3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	19000	20000	1.300.000.000	21000	1.300.000.000	21500	1.300.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	18	18	700.000.000	20	740.000.000	22	800.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					2.849.500.000		2.865.000.000		2.915.500.000	
		03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	77	2.849.500.000	80	2.865.000.000	80	2.915.500.000	
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	Orang	250	270	2.183.590.000	300	2.198.400.000	330	2.230.500.000	
		3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	29	17	785.000.000	20	835.000.000	20	885.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	210	270	1.398.590.000	300	1.363.400.000	330	1.345.500.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Laporan	7	7	425.000.000	9	446.600.000	9	585.000.000	
		3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	3	265.000.000	2	206.600.000	3	265.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	6	160.000.000	9	240.000.000	12	320.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	Unit	4	9	240.910.000	11	220.000.000	13	100.000.000	
		3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	3	4	170.910.000	5	150.000.000	6	50.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah		

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.300.000.000		1.332.500.000		1.349.500.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	%	97	98	1.300.000.000	98	1.332.500.000	99	1.349.500.000	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	173	195	1.237.474.962	215	1.269.849.712	217	1.286.849.712	
		3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	92	95	526.506.640	95	551.802.006	95	538.715.432	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	82	100	710.968.322	120	718.047.706	120	748.134.280	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	Varietas	3	3	62.525.038	3	62.650.288	3	62.650.288	
		3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)	3	3	62.525.038	3	62.650.288	3	62.650.288	Kabupaten/Kota
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.697.750.000		2.736.750.000		2.795.000.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	24	32	495.000.000	36	510.000.000	40	515.000.000	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	Kios	30	40	220.000.000	45	225.000.000	50	230.000.000	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	30	40	220.000.000	45	225.000.000	50	230.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	Laporan	7	10	275.000.000	11	285.000.000	11	285.000.000	
		3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Agens Hayati Yang Dikembangkan	Laporan	2	10	275.000.000	11	285.000.000	11	285.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT	%	72	75,8	2.202.750.000	75,9	2.226.750.000	76	2.280.000.000	
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	Ha	20.045	15.050	2.202.750.000	15.155	2.226.750.000	15.260	2.280.000.000	
		3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	20000	15000	2.042.750.000	15100	2.056.750.000	15200	2.100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	45	50	160.000.000	55	170.000.000	60	180.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi Perangkat Daerah. Selain itu sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja merupakan tolok ukur kinerja pada target tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Indikator tujuan dan sasaran menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam rencana Rencana Strategis tahun 2024-2026. Adapun IKU dan target pertahun disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Peran Subsektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara							
	LPE Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	%						
	- Tanaman Pangan		-14,80	0,65	0,70	0,80	0,94	0,94
	- Hortikultura		-6,33	0,90	1,29	1,72	1,88	1,88
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan							
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,50	77,65	77,85	77,95	78,05	78,05
	Meningkatnya Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura							
	Produksi Tanaman Pangan							
	- Produksi padi	Ton	239,435	289,846	239,505	239,580	239,680	239,680

	- Produksi jagung	Ton	73,936	73,986	74,186	74,686	75,686	75,686
	Produksi tanaman hortikultura	Ton	351,782	292,383	369,371	387,840	407,232	407,232
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani							
	Nilai tukar petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks						
	- Tanaman Pangan		92,90	92,95	93,00	93,06	93,12	93,12
	- Hortikultura		112,35	112,55	112,75	113,00	113,25	113,25
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas							
	Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
	Kepuasan masyarakat	Poin	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat							
	Akuntabilitas kinerja	Poin	64,10	64,10	70,02	72,25	74,00	74,00
	Kepuasan masyarakat	Poin	88,56	82,00	88,58	88,65	88,80	88,80

## **7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator kinerja penyelenggaraan yang disebut juga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrument pengukuran kinerja penyelenggaraan yang menjadi kewenangan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan dinas yang menjadi kewenangan dengan mengacu pada IKK outcome yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah. Indikator tersebut menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan. Indikator Kinerja Kunci dan target Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.2**

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Cadangan Pangan Provinsi (CPP)							
		%	59,83	86,95	88,83	92,07	96,61	96,61
2	Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertanian (Padi)							
		Ton / Ha	3,63	3,65	3,65	3,66	3,67	3,67

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Diharapkan juga RENSTRA ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan. Setelah RPD tahun 2024 – 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun hal – hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran ( impact) yang merujuk pada table 4.1 pada BAB IV Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome) yang merujuk pada table 6.2 pada Bab VI Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Pejabat eselon IV, pejabat fungsional yang disetarakan dan aparatur di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) yang merujuk pada table 6.2 pada Bab VI Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun dan realisasinya melalui DPA – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA – Dinas pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja sekaligus dijadikan instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, bilamana diperlukan sesuai hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan renstra seperlunya.

Pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA 3 (tiga) tahun ke depan disadari bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun demikian bukanlah pula satu kemustahilan. Dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas semua jajaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diyakini semua harapan

dan cita-cita pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan perencanaan pembangunan bidang pangan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat terlaksananya sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Samarinda, Mei 2023

Kepala Dinas Pangan,  
Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Timur,



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19690516 199301 2 001




RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009

## **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Basuki Rahmat No. 6 Telp. (0541) 742484 – 741676 Fax. (0541) 743867

**S A M A R I N D A**

Kode Pos No. 75121

Email : diperta\_kt@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 1197/DISPANTPH/SK-TIMRENSTRA/III/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun RENSTRA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun RENSTRA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.
- Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) adalah :
1. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  2. Mengevaluasi Pelaksanaan RENNSTRA PD Tahun lalu dan Capaian Renstra;
  3. Menyiapkan Dokumen Pendukung (TOR/KAK Per Kegiatan);
  4. Melakukan Koreksi dan Perbaikan terhadap draf RENSTRA PD dan finalisasi RENSTRA PD Tahun 2024-2026;
  5. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi terkait.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Dinas,



**Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001

**Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 1197/DISPANTPH/SK-TIMRENSTRA/III/2023  
Tanggal : Maret 2023  
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024-2026 :

NO.	NAMA	JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ir.Hj. Rini Susilawati, M.Si	Sekretaris,	Ketua Pelaksana
3.	Tanti Subandiyah, S.Sos	Perencana Ahli Muda (Program)	Sekretaris
4.	Ir. Diah Adiaty Yahya, MMT	Kabid. Produksi Tanaman Pangan	Anggota
5.	Kosasih, SP, MP	Kabid. Produksi Hortikultura,	Anggota
6.	Amaylia Dina Widyastuti, SP,M.Si	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan,	Anggota
7.	Rika Nuzli Furkanti, SP, MP	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Devis Hendra, SP, MP	Kepala UPTD Balai Benih Induk TPH	Anggota
9.	M. Riva Yovani, SP, M.Si	Kepala UPTD PSBTPH	Anggota
10.	Tri Ida Kartini, SP, MP	Kepala UPTD BPPSDMP	Anggota
11.	Rahmat Sutarto, SP, MP	Kepala UPTD PTPH	Anggota
12.	Perencanaan Program	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Dinas,



**Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001

Level Provinsi

SASARAN Strategis RPJMD

**TUJUAN**  
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

**SASARAN**  
Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Non Batubara (%)

**TUJUAN DINAS 1**  
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

**INDIKATOR**  
LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)  
2024 2025 2026  
Tanaman Pangan 0,7 0,8 0,94  
Hortikultura 1,29 1,72 1,68

**TUJUAN 2**  
Mewujudkan Budaya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung dengan ASN BerAKHLAK

**INDIKATOR**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja (PSM)  
2024 2025 2026  
Psni 78,5 79,3 80,01  
Tingkat Kepuasan Masyarakat 2021 2022 2023  
Psni 85 85,5 86

Sasaran Strategis RENSTRA

**SASARAN 1**  
Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan

**SASARAN 2**  
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

**SASARAN 3**  
Meningkatnya Kesejahteraan Petani

**SASARAN 4**  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Level Dinas

IKU / Indikator Sasaran RENSTRA

Indeks Ketahanan Pangan  
2024 2025 2026  
Indeks 77,85 77,95 78,05

Produk Tanaman Pangan (Ton)  
2024 2025 2026  
Padi 239.505 239.580 239.680  
Jagung 74.185 74.698 75.686

Produk Hortikultura (Ton)  
2024 2025 2026  
Hortikultura 369.371 387.840 407.232

NTP Tanaman Pangan (Indeks)  
2024 2025 2026  
NTP 93 93,06 93,12

NTP Hortikultura (Indeks)  
2024 2025 2026  
NTP 112,75 113 113,25

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)  
2024 2025 2026  
Nilai 70,01 75 80

Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)  
2024 2025 2026  
Skor 88,58 88,65 88,6

Program Pengawasan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kesejahteraan  
2024 2025 2026  
% 97,1 97,76 97,4  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi  
2024 2025 2026  
Skor 95,3 95,5 95,7

Program Penanganan Kerawanan Pangan  
Persentase Daerah Rawan Pangan  
2024 2025 2026  
% 0 0 0  
Jumlah Kecamatan yang Mengelap Status Ketahanan Pangan  
2024 2025 2026  
Kecamatan 0 0 0

Program Penguasaan Keamanan Pangan  
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan  
2024 2025 2026  
% 85 86 87

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan  
2024 2025 2026  
% 35,4 35,7 35,9  
Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura  
2024 2025 2026  
% 32,29 31,67 32,64

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT  
2024 2025 2026  
% 75,8 75,9 76

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan  
2024 2025 2026  
% 41,29 41,76 41,81

Program Penyuluhan Pertanian  
Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Mengikuti Pelatihan  
2024 2025 2026  
% 77 80 80

Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan  
2024 2025 2026  
Indeks 82 82,7 83,4

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan  
Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan  
2024 2025 2026  
Laporan 12 12 12

Kegiatan Penyesuaian Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi  
FSVA  
2024 2025 2026  
Laporan 1 1 1

Kegiatan Pelaksanaan Penguasaan Keamanan Pangan Segar Asal Ter Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal  
2024 2025 2026  
Dokumen 16 18 20

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura  
2024 2025 2026  
% 11,59 11,66 13,07

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  
Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI  
2024 2025 2026  
Ha 10500 15155 15260

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian  
Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  
2024 2025 2026  
Unit 8 10 16

Kegiatan Pengembangan Ketenangan Penyuluhan Pertanian  
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan  
2024 2025 2026  
Orang 270 300 330

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu  
2024 2025 2026  
% 99 99 99

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi  
Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia  
2024 2025 2026  
Person 88,83 92,07 95,41

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi  
Wahayn Rawan Pangan Yang Ditangani  
2024 2025 2026  
Kecamatan 10 10 10

Sub Kegiatan Kegiatan Kelembagaan Keamanan Pangan Provinsi  
Kelembagaan Keamanan Pangan Seger Provisi Yang Dibina  
2024 2025 2026  
Dokumen 1 1 1

Kegiatan Penguasaan Peredaran Sarana Pertanian  
Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan  
2024 2025 2026  
Ha 4.760 9.500 9.250

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan  
2024 2025 2026  
Ha 1500 1500 1500

Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian  
Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian  
2024 2025 2026  
Dokumen 2 2 2

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penanganan Pangan  
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Penyuluhan Pertanian  
2024 2025 2026  
Laporan 7 9 9

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Persentase Realisasi Anggaran (RPTD) BHTPH  
2024 2025 2026  
% 91,25 91,27 91,40

Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi  
Media Promosi Pengamalgan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  
2024 2025 2026  
Media 3 3 3

Sub Kegiatan Penyesuaian, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan  
2024 2025 2026  
Dokumen 2 2 2

Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
2024 2025 2026  
Dokumen 1 1 1

Kegiatan Penguasaan Peredaran Sarana Pertanian  
Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura  
2024 2025 2026  
Ha 800 860 860

Sub Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  
Jumlah Awa Terpapar Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani  
2024 2025 2026  
Ha 60 65 65

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani  
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani  
2024 2025 2026  
Dokumen 2 2 2

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan  
Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Laba-laba Usaha Masyarakat, Kecamatan  
2024 2025 2026  
Unit 9 11 13

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Persentase Realisasi Anggaran (RPTD) BHTPH  
2024 2025 2026  
% 90 90 90

Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Harga Bahan Makanan  
Informasi Harga Pangan dan Harga Bahan Makanan  
2024 2025 2026  
Laporan 13 13 13

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi  
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi  
2024 2025 2026  
Dokumen 1 1 1

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan  
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan  
2024 2025 2026  
Paket 1 1 1

Kegiatan Penguasaan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pangan  
Luas Lahan yang Menggunakan Benih Bersertifikat  
2024 2025 2026  
Ha 295 360 366

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  
2024 2025 2026  
Dokumen 2 2 2

Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN  
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pengembangan Kompetensi  
2024 2025 2026  
Orang 140 270 300

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Persentase Realisasi Anggaran (RPTD) BHTPH  
2024 2025 2026  
% 45,6 45,7 48

Kegiatan Administrasi Kerjasama Perangkat Daerah  
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)  
2024 2025 2026  
% 100 100 100

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya  
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya  
2024 2025 2026  
Dokumen 1 1 1

Sub Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan  
Jumlah Pengendalian, Pengawasan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan  
2024 2025 2026  
Mencakup Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
2024 2025 2026  
Dokumen 1 1 1

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi  
Jumlah Varietas Daerah yang Ditilai  
2024 2025 2026

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi  
Jumlah Varietas Daerah yang Ditilai  
2024 2025 2026

Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  
Jumlah Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  
2024 2025 2026  
% 85 85 86

Kegiatan Administrasi Kerjasama Perangkat Daerah  
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (RPTD) BHTPH  
2024 2025 2026  
% 100 100 100

Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  
Jumlah Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  
2024 2025 2026  
% 85 85 86

Kegiatan Administrasi Kerjasama Perangkat Daerah  
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (RPTD) BHTPH  
2024 2025 2026  
% 100 100 100

Jumlah Laporan monitoring stok pangan strategis			
	2024	2025	2026
Laporan	12	12	12

<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi</b>			
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi			
	2024	2025	2026
Laporan	12	12	12
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</b>			
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</b>			
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Tersimpan			
	2024	2025	2026
Ton	300	300	300

<b>Sub Kegiatan Promosi Pengenalaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</b>			
Jumlah Promosi Pengenalaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
	2024	2025	2026
Gal	8	8	8
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BESKA)</b>			
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BESKA)			
	2024	2025	2026
Laporan	4	4	4
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</b>			
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1

Varietas Unggul Baru (VUB)	3	3	3
Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi			
	2024	2025	2026
Laporan	10	11	11

<b>Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Sarana Pendukung Pertanian</b>			
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Sarana Pendukung Pertanian			
	2024	2025	2026
Laporan	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>			
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
	2024	2025	2026
Dokumen	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Sarana Pendukung Pertanian</b>			
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Sarana Pendukung Pertanian			
	2024	2025	2026
Laporan	45	45	45

<b>Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura</b>			
Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
	2024	2025	2026
Laporan	4	4	4
<b>Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</b>			
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih</b>			
Jumlah Sertifikat Benih			
	2024	2025	2026
Sertifikat	90	95	100
<b>Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura</b>			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
	2024	2025	2026
Laporan	44	45	45
<b>Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</b>			
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran			
	2024	2025	2026
Dokumen	60	61	61

<b>Sub Kegiatan Penilaian Kultur SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme</b>			
Jumlah Kultur SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai			
	2024	2025	2026
Varietas Unggul Baru (VUB)	3	3	3
<b>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme</b>			
Jumlah Agensi Hayati yang Dikembangkan			
	2024	2025	2026
Laporan	3	3	3

	2024	2025	2026
Dokumen	5	6	6
<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani</b>			
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan			
	2024	2025	2026
Kelompok	6	9	12

<b>Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Keterampilan Kooperatif Petani</b>			
Jumlah Kelompok Petani yang Dibentuk dan Beroperasi			
	2024	2025	2026
Unit	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani</b>			
Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani			
	2024	2025	2026
Laporan	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Sekolah Lapang Kelompok Tani</b>			
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			
	2024	2025	2026
Unit	4	5	6

<b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat manajemen (LETA,PTPH)</b>			
	2024	2025	2026
%	83,80	83,90	84,00

<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (LETA, BBT/PTPH)			
	2024	2025	2026
%	100	100	100
Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (LETA, BPPS/MDP)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (LETA, PSRT/PA)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (LETA, PTPH)			
	2024	2025	2026
%	81,05	82,35	83,45

<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
Persentase pemenuhan BMD (Dinas)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase pemenuhan BMD (LETA, BBT/PTPH)			
	2024	2025	2026
%	100	100	100
Persentase pemenuhan BMD (LETA, BPPS/MDP)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase pemenuhan BMD (LETA, PTPH)			
	2024	2025	2026
%	80,00	83,50	84

<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (LETA, BBT/PTPH)			
	2024	2025	2026
%	100	100	100
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (LETA, BPPS/MDP)			
	2024	2025	2026
%	100	100	100
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (LETA, PTPH)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (LETA, PT PH)			
	2024	2025	2026
%	88,80	88,95	89,07

<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (LETA, BBT/PTPH)			
	2024	2025	2026
%	100	100	100
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (LETA, BPPS/MDP)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (LETA, PSRT/PA)			
	2024	2025	2026
%	90	90	90
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (LETA, PTPH)			
	2024	2025	2026
%	89,85	88,60	88,72

<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>			
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			
	2024	2025	2026
Dokumen	5	5	6
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD</b>			
Jumlah dokumen RKAS-SKPD			

	2024	2025	2026
Dokumen	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>			
Jumlah dokumen DPA-SKPD			
	2024	2025	2026
Dokumen	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>			
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	2024	2025	2026
Laporan	4	4	4
<b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	2024	2025	2026
Laporan	4	4	4

<b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
	2024	2025	2026
Orang / Bulan	200	217	179
<b>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>			
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas)			
	2024	2025	2026
Dokumen	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (LPTD BP/PSDM/MP)			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (LPTD PSB/TPH)			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (LPTD P/TPH)			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>			
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas)			
	2024	2025	2026
Dokumen	12	12	12
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (LPTD BB/TPH)			
	2024	2025	2026
Dokumen	12	12	12
<b>Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>			
Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan			
	2024	2025	2026
Dokumen	3	3	3
<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>			
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	2024	2025	2026
Laporan	18	18	18
<b>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>			
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	2024	2025	2026
Dokumen	4	4	4

<b>Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>			
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>			
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
	2024	2025	2026
Dokumen	4	4	4
<b>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</b>			
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1

<b>Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya</b>			
Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya (Dinas)			
	2024	2025	2026
Paket	1	1	1
Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya (LPTD BB/TPH)			
	2024	2025	2026



Paket	1	1	1
Jumlah Paket Pekerjaan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (LPTD PTPH)			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Paket	1	1	1
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Dokumen	1	1	1
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Dokumen	1	1	1
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dinas)			
2024	2025	2026	
17	19	20	
Orang	17	19	20
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (LPTD BBTPH)			
2024	2025	2026	
12	18	22	
Orang	12	18	22
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (LPTD PSBTPH)			
2024	2025	2026	
26	26	27	
Orang	26	26	27
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (LPTD PPTPA)			
2024	2025	2026	
25	26	27	
Orang	25	26	27

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)			
2024	2025	2026	
16	16	15	
Paket	16	16	15
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (LPTD BBTPH)			
2024	2025	2026	
12	12	12	
Paket	12	12	12
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (LPTD BPSBMP)			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Paket	1	1	1
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (LPTD PSBTPH)			
2024	2025	2026	
50	55	50	
Paket	50	55	50
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (LPTD PTPH)			
2024	2025	2026	
Paket			
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas)			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Paket	1	1	1
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD BBTPH)			
2024	2025	2026	
12	12	12	
Paket	12	12	12
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD PSBTPH)			
2024	2025	2026	
12	12	12	
Paket	12	12	12
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD PTPH)			
2024	2025	2026	
7	7	6	
Paket	7	7	6
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dinas)			
2024	2025	2026	
30	32	30	
Paket	30	32	30
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (LPTD BBTPH)			
2024	2025	2026	
12	12	12	
Paket	12	12	12
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (LPTD PSBTPH)			
2024	2025	2026	
12	12	12	
Paket	12	12	12
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (LPTD PTPH)			
2024	2025	2026	
16	12	12	
Paket	16	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dinas)			
2024	2025	2026	
30	32	30	
Paket	30	32	30
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (LPTD PTPH)			
2024	2025	2026	
12	16	17	
Dokumen	12	16	17
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas)			
2024	2025	2026	
177	187	187	
Laporan	177	187	187
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (LPTD BBTPH)			
2024	2025	2026	

Laporan	12	12	12
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (LPTD PSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	7	8	8
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	4	4	4
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas)			
	2024	2025	2026
Dokumen	4	4	6
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (LPTD PSBTPH)			
	2024	2025	2026
Dokumen	1	1	1

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	2024	2025	2026
Unit	4	6	6
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (LPTD BSBTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	3	3	3
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (LPTD PSBTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	32	33	33
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	3	3	3
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	80	60	70
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (LPTD BSBTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	3	3	3
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Unit	2	2	2

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (LPTD BSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (LPTD PSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dinas)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (LPTD BSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (LPTD PSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD BSBTPH)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1

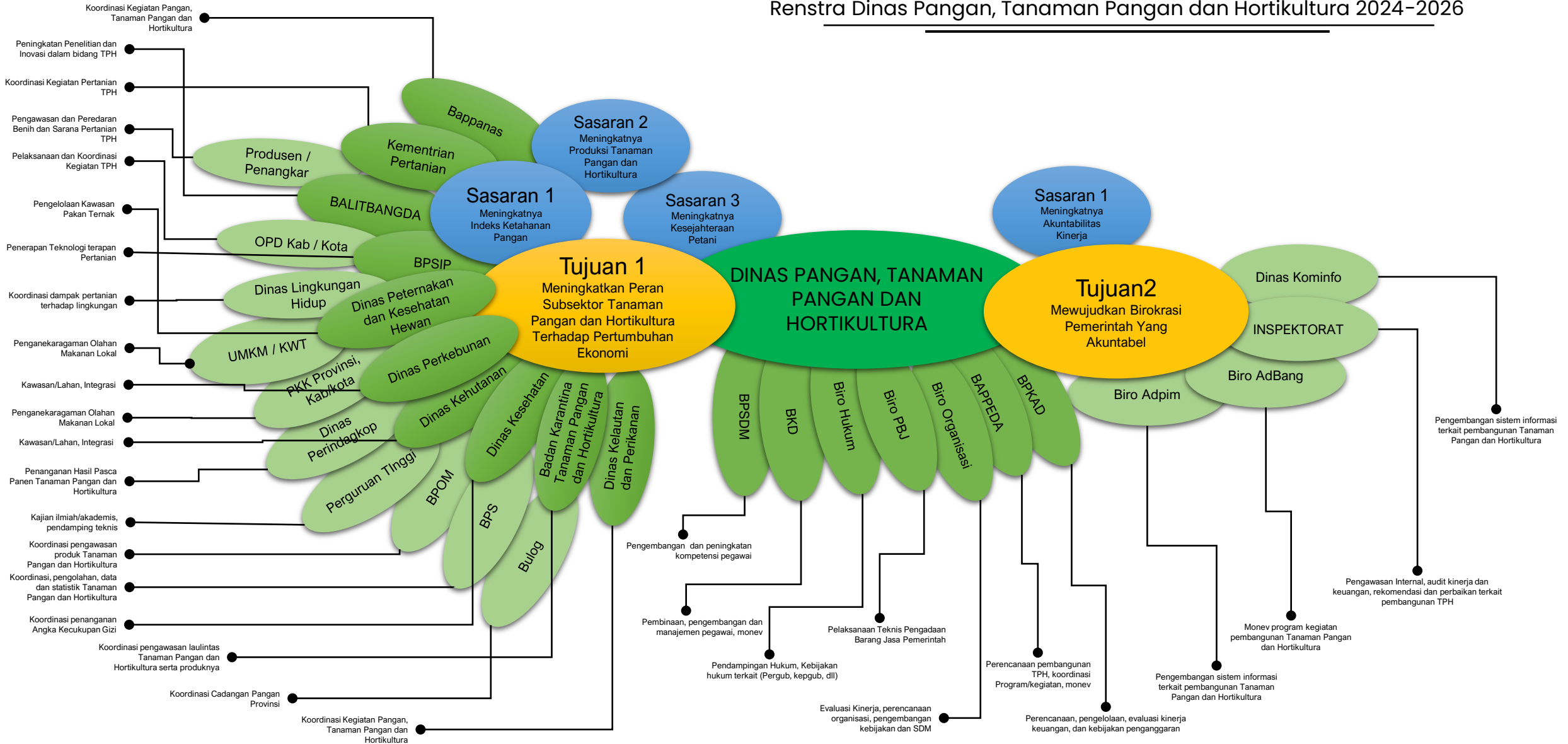
Perengkapan Kantor yang Disediakan (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dinas)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (LPTD BBTFPA)			
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (LPTD BPPSDMP)			
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (LPTD PSBTPA)			
Laporan	1	1	1
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (LPTD PTPA)			
	2024	2025	2026
Laporan	1	1	1

<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	16	16	17
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya (LPTD PTPA)			
	2024	2025	2026
Unit	1	1	1
<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	28	28	28
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD BBTFPA)			
	2024	2025	2026
Unit	6	6	6
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Unit	9	9	9
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD PSBTPA)			
	2024	2025	2026
Unit	13	13	13
<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	28	28	28
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD BBTFPA)			
	2024	2025	2026
Unit	6	6	6
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD BPPSDMP)			
	2024	2025	2026
Unit	9	9	9
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (LPTD PSBTPA)			
	2024	2025	2026
Unit	13	13	13
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	72	73	73
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (LPTD BBTFPA)			
	2024	2025	2026
Unit	12	12	12
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (LPTD PSBTPA)			
	2024	2025	2026
Unit	12	12	12
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</b>			
Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Dinas)			
	2024	2025	2026

Unit	2	2	2
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>			
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	6	4	3
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD BBT/PA)			
	2024	2025	2026
Unit	2	2	2
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD BPPS/DMP)			
	2024	2025	2026
Unit	1	1	1
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	12	12	12
<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>			
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dinas)			
	2024	2025	2026
Unit	6	4	3
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD BBT/PA)			
	2024	2025	2026
Unit	2	2	2
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD BPPS/DMP)			
	2024	2025	2026
Unit	1	1	1
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (LPTD PTPH)			
	2024	2025	2026
Unit	12	12	12

# CROSSCUTTING MAP

Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024-2026



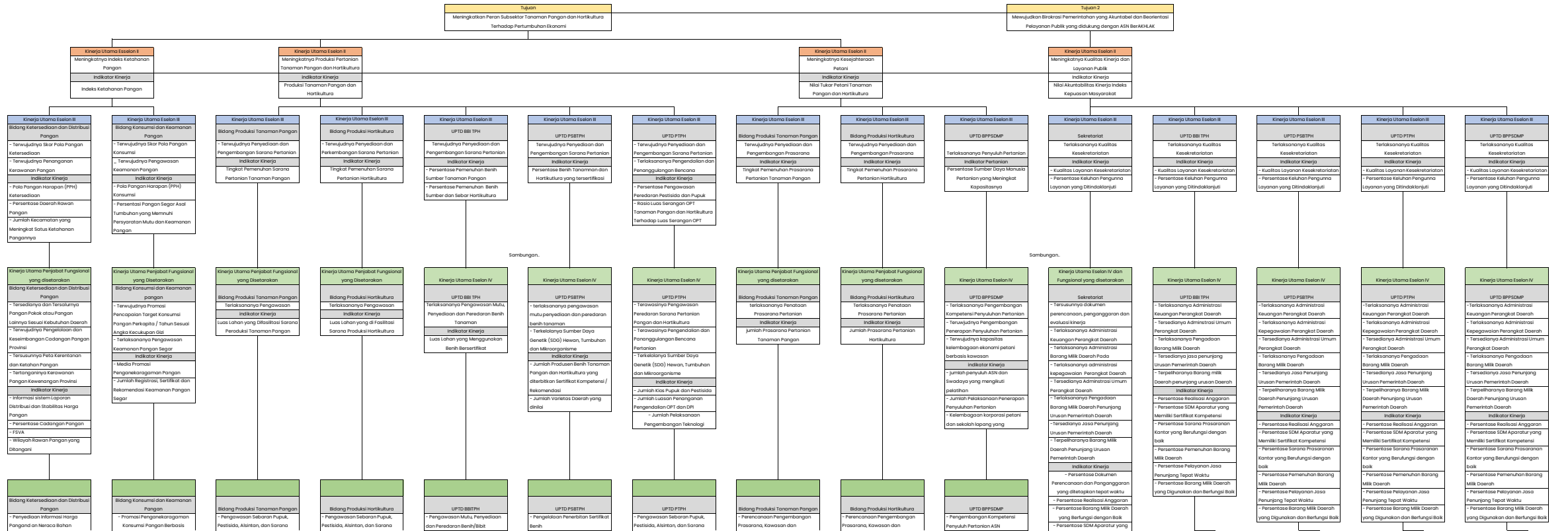
**Luas Baku Sawah Nasional Kaltim Per-Kecamatan Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Ha</b>
<b>1</b>	<b>Balikpapan</b>		<b>135,6</b>
		Kec. Balikpapan Timur	135,6
<b>2</b>	<b>Berau</b>		<b>1919,0</b>
		Kec. Biatan	102,7
		Kec. Gunung Tabur	583,6
		Kec. Sambaliung	616,7
		Kec. Tabalar	290,6
		Kec. Talisayan	60,9
		Kec. Tanjung Redeb	4,0
		Kec. Teluk Bayur	260,5
<b>3</b>	<b>Bontang</b>		<b>65,2</b>
		Kec. Bontang Selatan	62,4
		Kec. Bontang Utara	2,8
<b>4</b>	<b>Kutai Barat</b>		<b>171,9</b>
		Kec. Barong Tongkok	44,0
		Kec. Bongan	103,6
		Kec. Long Iram	16,9
		Kec. Muara Pahu	2,9
		Kec. Nyuatan	4,6
<b>5</b>	<b>Kutai Kartanegara</b>		<b>18757,4</b>
		Kec. Anggana	725,5
		Kec. Kembang Janggut	38,4
		Kec. Kenohan	1085,5
		Kec. Kota Bangun	1412,8
		Kec. Loa Janan	95,5
		Kec. Loa Kulu	3050,9
		Kec. Loajanan	355,0
		Kec. Marangkayu	1461,6
		Kec. Muara Badak	129,2
		Kec. Muara Jawa	184,3
		Kec. Muara Kaman	1429,0
		Kec. Muara Muntai	9,6
		Kec. Muara Wis	112,6
		Kec. Samboja	1086,0
		Kec. Sanga-Sanga	332,0
		Kec. Sebulu	1469,5
		Kec. Tabang	29,9
		Kec. Tenggarong	1359,5
		Kec. Tenggarong Seberang	4390,5
<b>6</b>	<b>Kutai Timur</b>		<b>2638,8</b>
		Kec. Bengalon	60,3
		Kec. Busang	6,5
		Kec. Kaliorang	758,4
		Kec. Karangan	113,3
		Kec. Kaubun	715,4
		Kec. Kombeng	223,4
		Kec. Long Mesangat	198,6
		Kec. Muarabengkal	54,6
		Kec. Muarawahau	0,7
		Kec. Rantau Pulung	234,6
		Kec. Sandaran	10,7
		Kec. Sangatta Selatan	56,6

**Luas Baku Sawah Nasional Kaltim Per-Kecamatan Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Ha</b>
		Kec. Sangkulirang	16,3
		Kec. Teluk Pandan	189,3
<b>7</b>	<b>Mahulu</b>		<b>24,4</b>
		Kec. Long Hubung	24,4
<b>8</b>	<b>Paser</b>		<b>7062,3</b>
		Kec. Kuario	331,9
		Kec. Longikis	448,3
		Kec. Longkali	3779,5
		Kec. Muara Balengkong	1373,3
		Kec. Paser Balengkong	148,0
		Kec. Tanah Grogot	981,3
<b>9</b>	<b>Penajam Paser Utara</b>		<b>8672,5</b>
		Kec. Babulu	6544,1
		Kec. Penajam	1081,0
		Kec. Sepaku	477,0
		Kec. Waru	570,4
<b>10</b>	<b>Samarinda</b>		<b>1958,5</b>
		Kec. Loa Janan Ilir	283,1
		Kec. Palaran	488,4
		Kec. Samarinda Seberang	8,8
		Kec. Samarinda Ulu	3,5
		Kec. Samarinda Utara	834,6
		Kec. Sambutan	340,1
	<b>Total</b>		<b>41405,7</b>

POHON KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALTIM 2024 - 2026





Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kerawanan Pangan Provinsi
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator Kinerja
- Informasi Harga Pangan dan Nersa Bahan Makanan
- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Jumlah laporan monitoring stok pangan strategis
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara
- Peta dan Analisis ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kerawanan Pangan Provinsi
- Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Adwasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BESIA)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun
- Penguatan Ketersediaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Keamanan Pangan Segar Asal Indikator Kinerja
- Jumlah Promosi Penggerakragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Adwasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BESIA)
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per Tahun
- Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina
- Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pendukung Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Peredaran Sarana Pertanian
Indikator Kinerja
- Jumlah Pengembangan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alatiran, dan Sarana
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan

Pendukung Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Peredaran Sarana Pertanian
Indikator Kinerja
- Jumlah Pengembangan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alatiran, dan Sarana
- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Peredaran Sarana Pertanian Hortikultura

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
Indikator Kinerja
- Jumlah Pengembangan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Syarat Mutu, Penyediaan dan Peredaran

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
Indikator Kinerja
- Jumlah Pengembangan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Syarat Mutu, Penyediaan dan Peredaran
- Jumlah Kultur SDG Tumbuhan dan Mitroorganisme yang Dibina

Pendukung Pertanian
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mitroorganisme
- Pengembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OP1) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Pengembangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Indikator Kinerja
- Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Jumlah Pengembangan dan Pemantauan Prasarana, Kawasan dan Komoditas
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
- Jumlah Area Terlempak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dibangun
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha

Komoditas Pertanian
- Pengembangan dan Pemantauan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
Indikator Kinerja
- Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Jumlah Pengembangan dan Pemantauan Prasarana, Kawasan dan Komoditas
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha

Komoditas Pertanian
- Pengembangan dan Pemantauan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
Indikator Kinerja
- Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Jumlah Pengembangan dan Pemantauan Prasarana, Kawasan dan Komoditas
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha

- Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
- Diwujudkan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi
- Pelaksanaan Pelayanan Jasa Penyuluh Tapak Waktu
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang
Indikator Kinerja
- Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi
- Jumlah Tersampai Petani yang Mendapat Pendidikan dan Pemberdayaan
- Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi
- Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani
- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan

memiliki sertifikat kompetensi
- Persentase Sarana Perasarana Kantor yang berfungsi dengan baik
- Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah
- Persentase Pelayanan Jasa Penyuluh yang Berkualitas
- Persentase Barang Milik Daerah Dipergunakan dengan Bertanggung Jawab
Indikator Kinerja
- Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
- Jumlah dokumen RKA-SKPD

UPTD BIPBTH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Perawatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
- Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya
- Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

UPTD BIPBTH
Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
- Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya
- Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

UPTD BIPBTH
Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
- Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya
- Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

UPTD BIPBTH
Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
- Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bonyo Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya
- Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Jumlah Dokumen DFA SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan Berkas realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan evaluasi kinerja pengabdian daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gag dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MlK Daerah
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MlK Daerah SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MlK Daerah pada SKPD
Jumlah Paket Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan
Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Hozaman dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen Usul Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perlizinan
Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi